



**Forest Peoples  
Programme**

**Tom Griffiths  
Juni 2007**

## **“RED”: AWAS?**

**“Pencegahan deforestasi” dan hak-hak  
Masyarakat adat dan komunitas lokal**



**“RED”: AWAS?  
“Pencegahan deforestasi” dan hak-hak Masyarakat adat dan  
komunitas lokal**

**Tom Griffiths**

*Laporan ini dibuat atas dukungan dana dari Charles Stewart Mott  
Foundation dan Moriah Fund.*

Semua hak dilindungi Undang-undang. Bagian dari laporan ini boleh  
direproduksi untuk majalah dan koran dengan menyebut rujukan kepada Tom  
Griffiths dan Forest Peoples Programme.

Diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh Ima Susilowati



© Forest Peoples Programme, 2007

- Edisi asli: bahasa Inggris: Seeing ‘RED’?  
‘Avoided deforestation’ and the rights of Indigenous  
Peoples and local communities
- Edisi bahasa Spanyol: ‘RED’: ¿Alerta Roja?  
La ‘deforestación evitada’ y los derechos de los  
Pueblos Indígenas y las comunidades locales
- Edisi bahasa Perancis: « RED » Alerte rouge ?  
La « déforestation évitée » et les droits des peuples  
autochtones et des communautés locales
- Foto-foto sampul: Sisipan: Seorang penduduk desa di Ruwa, Gunung  
Elgon, Uganda, memperlihatkan selongsong peluru  
yang disasarkan kepada orang-orang yang bekerja  
di lahan mereka. Lahan tersebut berada di dalam  
kawasan perkebunan untuk skema perdagangan  
karbon yang terlibat sengketa di wilayah perbatasan  
Taman Nasional Gunung Elgon. Foto diambil bulan  
Agustus 2006.  
Latar belakang: Perkebunan skema perdagangan  
karbon FACE di lereng Gunung Elgon yang  
berbatasan dengan desa Ruwa.
- Fotografer: Jutta Kill, FERN

## Isi

Singkatan	2
ingkasan Eksekutif	3
I Pengantar dan Latar belakang	5
II Pendekatan umum dan khusus untuk pencegahan deforestasi	7
III Inisiatif pencegahan deforestasi dan skema percontohan yang diusulkan	12
IV Keprihatinan tak terjawab mengenai hak, keadilan, akuntabilitas dan penghidupan	13
V Langkah selanjutnya?	19
Lampiran 1 Hutan dalam negosiasi-negosiasi kebijakan perubahan iklim global di waktu lalu	22
Lampiran 2 Kajian Stern atas Pencegahan Deforestasi	24
Lampiran 3 Usulan Bank Dunia yang kontroversial bagi Aliansi Hutan Global (GFA)	26
Catatan Akhir	29

## Singkatan

AD	Avoided deforestation
A/R	Afforestation/Reforestation
BCF	Biocarbon Fund (dari Bank Dunia)
CANI	Climate Action Network International (jaringan LSM)
CBD	Convention on Biological Diversity
CCB	Climate, Community and Biodiversity (Standar)
CDM	Clean Development Mechanism
CERD	Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
CIFOR	Center for International Forestry Research
COICA	Coordinating Body of Indigenous Organisations of the Amazon Basin
COP	Conference of the Parties
CR	Compensated reduction
CRN	Coalition of Rainforest Nations
ETS	EU Emission Trading Scheme
FCPF	Forest Carbon Partnership Facility (sebuah proposal dari Bank Dunia)
FPIC	Free, prior and informed consent
FPP	Forest Peoples Programme
FRA	Forest Resource Assessment (dari FAO)
FSC	Forest Stewardship Council
GEF	Global Environment Facility
GFA	Global Forest Alliance (proposal of the World Bank)
GHG	Greenhouse gas
IAITPTF	International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests
IFC	International Finance Corporation (proposal dari Bank Dunia)
IFIPCC	International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change
IIED	International Institute for Environment and Development
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
LULUCF	Land Use, Land-use Change and Forestry
MOP	Meeting of the Parties
NCAS	National Carbon Accounting System (dari Australia)
ODA	Official Development Assistance
ODI	Overseas Development Institute
PCF	Prototype Carbon Fund (dari Bank Dunia)
PES	Payment for Environmental Services
RED	Reduced Emissions from Deforestation
REDD	Reduced Emissions from Deforestation and Degradation
RER	Reference Emission Rate
RUPES	Rewarding Upland Poor for Environmental Services (dari ICRAF)
SBSTA	Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (dari UNFCCC)
TFAP	Tropical Forestry Action Plan (sebelumnya dari Bank Dunia dan FAO)
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
WRM	World Rainforest Movement

## ingkasan Eksekutif

Pencegahan deforestasi atau ‘*Avoided deforestation*’ (AD)—mengacu pada pencegahan atau pengurangan hilangnya hutan dengan maksud untuk menurunkan emisi gas yang mengakibatkan pemanasan global—telah menjadi isu kunci dalam setiap debat kebijakan tentang perubahan iklim. Badan Ilmiah dari Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) tengah membuat laporan tentang bagaimana mencapai target Penurunan Emisi dari Deforestasi (“*Reduced Emissions from Deforestation*”/RED) yang akan disampaikan pada Konferensi Negara-Negara Pihak (COP) berikutnya yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada bulan Desember 2007. Para pendukung RED menginginkan insentif bagi konservasi hutan menjadi bagian dari instrumen perdagangan Protokol Kyoto pada fase berikutnya (pasca 2012). Proposal untuk dana “pencegahan deforestasi” global dan regional dengan cepat berlipat ganda jumlahnya. Bank Dunia tengah berusaha menjadi badan internasional utama yang memimpin insiatif global RED. Pada pertengahan 2007, badan ini meminta kelompok negara-negara industri anggota G8 untuk memberi dukungan politik dan pendanaan terhadap rencana baru Bank Dunia yang kontroversial, yaitu Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) yang akan menjadi skema percontohan untuk mengurangi emisi dari deforestasi di lima negara tropis.

Ide dasarnya adalah negara-negara Utara membayar negara-negara Selatan untuk mengurangi penggundulan hutan dalam wilayah negara mereka. Salah satu usulan adalah dengan memberi bantuan keuangan untuk kepentingan tersebut. Usulan lainnya adalah negara-negara Selatan, di bawah sistem global perdagangan karbon, menjual karbon yang tersimpan di hutan mereka kepada negara-negara Utara sehingga industri-industri di Utara dapat terus melakukan pencemaran seperti biasa. Beberapa kalangan menyarankan bahwa pendanaan untuk skema AD seharusnya berasal dari kombinasi dana publik dan pasar karbon.

Semua skema tersebut diatas berimplikasi penting terhadap bagaimana hutan dikelola, siapa yang mengelolanya, dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap hutan. Apa implikasi perubahan-perubahan ini terhadap ratusan juta masyarakat adat dan komunitas-komunitas yang tergantung pada hutan lainnya, dimana penghidupan, budaya dan masa depan mereka telah melekat dengan hutan? Kertas Briefing ini dirancang untuk memperingatkan pelaku advokasi masyarakat dan pengambil kebijakan lain terhadap isu yang sedikit sekali didiskusikan ini. Kertas briefing ini mencatat kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan kunci antara beberapa proposal-proposal AD, dan mendokumentasikan beberapa kekhawatiran mengenai inisiatif-inisiatif seperti Aliansi Hutan Global (*Global Forest Alliance/GFA*) dan FCPF dari Bank Dunia. Briefing ini memperingatkan bahwa ekspansi skema AD yang cepat tanpa mengindahkan persoalan hak asasi manusia, isu sosial dan mata pencaharian akan menimbulkan resiko sebagai berikut:

- Memperbarui dan bahkan meningkatkan kontrol negara dan “para ahli” terhadap hutan
- Dukungan pemerintah yang berlebihan terhadap model-model konservasi hutan yang anti-masyarakat dan penyingkiran (pengusiran/penggusuran, pengambilalihan) untuk melindungi keuntungan dari “cadangan” karbon di hutan.
- Secara tidak adil menyasar masyarakat adat dan masyarakat marginal sebagai “penggerak” deforestasi.
- Pelanggaran terhadap hak atas tanah dan wilayah masyarakat adat
- Penetapan batas wilayah hutan oleh negara dan LSM tanpa melibatkan persetujuan dan partisipasi penuh masyarakat penghuni hutan
- Pemaksaan “harga” yang tidak adil atas perlindungan hutan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal
- Kontrak-kontrak dengan masyarakat yang tidak adil dan kejam

- Spekulasi tanah, penyerobotan tanah dan konflik-konflik pertanahan (persaingan klaim terhadap kompensasi AD)
- Korupsi dan penggelapan dana-dana internasional oleh elit nasional
- Meningkatnya kesenjangan dan potensi konflik antara penerima dan bukan penerima dana AD
- Potensi konflik di antara masyarakat adat (tentang penerimaan atau penolakan skema AD)

Apabila resiko-resiko tersebut bisa dihilangkan atau dikurangi, maka kebijakan-kebijakan AD serta meningkatnya pendanaan di luar perdagangan karbon bisa memberi kesempatan kepada sebagian masyarakat adat dan komunitas yang bergantung pada hutan. Meski demikian, sebuah jaminan dari badan-badan global dan pemerintah bahwa masalah yang mungkin timbul dari kebijakan AD yang *top-down* bisa diatasi melalui “sertifikasi” dan “pendekatan partisipatif” tidaklah memadai. Sangat penting adanya jaminan yang lebih kuat bahwa hak asasi dan hak-hak adat masyarakat yang tergantung dari hutan akan dihormati dan bahwa prioritas mereka akan dilaksanakan dengan semestinya dalam setiap kebijakan dan program AD yang akan datang. Sebagai langkah pertama, sangatlah penting bagi masyarakat adat dan gerakan-gerakan akar rumput lainnya untuk terlibat sepenuhnya dalam pembicaraan mengenai pro-kontra pencegahan deforestasi dalam kebijakan-kebijakan global tentang iklim.

## I Pengantar dan Latar belakang

Setelah terus-terusan diperingatkan oleh kalangan ilmuwan, masyarakat sipil dan masyarakat adat bahwa perubahan iklim sedang berlangsung dan menjadi semakin cepat, sebagian besar pemerintah dewasa ini mulai terlihat menyadari bahwa tindakan yang lebih efektif harus dilakukan untuk menghentikan pemanasan global. Semakin disadari bahwa deforestasi, khususnya di hutan tropis, menyumbang antara 18 sampai 20% dari seluruh emisi gas CO<sub>2</sub> global per tahun, dan di beberapa negara, misalnya Brazil, angkanya diatas 75% dari pelepasan CO<sub>2</sub> tahunan yang berasal dari aktivitas manusia. Sebagai konsekuensinya, berkembanglah kesepakatan internasional bahwa kebijakan-kebijakan di masa depan untuk memerangi perubahan iklim harus melibatkan tindakan untuk mengurangi deforestasi di negara-negara tropis.

### ***Tuntutan yang diperbarui mengenai insentif untuk pencegahan deforestasi di bawah UNFCCC***

Meskipun dulunya terdapat kontroversi mengenai dimasukkannya isu hutan di bawah protokol Kyoto (Lampiran 1), kebijakan untuk mencegah deforestasi melalui pemberian insentif ekonomi yang dimaksudkan untuk mendorong negara-negara tropis melindungi cadangan karbon di hutan mereka baru-baru ini telah disampaikan oleh pemerintah negara-negara Selatan dan Utara, LSM konservasi, konsultan swasta dan apa yang disebut sebagai perusahaan-perusahaan “*carbon finance* (pembiayaan karbon)”.

Pada bulan Desember 2005, Koalisi Bangsa-Bangsa Hutan Tropis (*Coalition of Rainforest Nations*)<sup>12</sup> yang dipimpin oleh Kosta Rika dan Papua New Guinea menyampaikan usulan resmi untuk menurunkan emisi “gas rumah kaca (GHG)” dari deforestasi pada Konferensi Negara-negara Pihak ke-11 (COP) UNFCCC dan pada Pertemuan Negara-negara Pihak pertama Protokol Kyoto (COP11/MOP11). Pada pertemuan tersebut, beberapa LSM dan para ilmuwan yang dipimpin oleh Environmental Defense menekankan kembali tuntutan sebelumnya untuk memasukkan isu hutan dibawah instrumen perdagangan Protokol Kyoto<sup>3</sup>. Sebagai hasilnya, COP11 meminta Badan Pekerja Ilmiah dan Pertimbangan Teknis (SBSTA) untuk mengevaluasi masalah-masalah pencegahan deforestasi dan mitigasi/pengurangan perubahan iklim dan melaporkannya kembali kepada UNFCCC COP13/MOP3 pada bulan Desember 2007. UNFCCC telah menyelenggarakan dua pertemuan internasional tentang pencegahan deforestasi (pada bulan Juli 2006 dan Maret 2007)<sup>4</sup>.

Dorongan utama pilihan dunia untuk mekanisme RED untuk mitigasi perubahan iklim muncul ketika pemerintah Brazil, yang menolak mengaitkan skema-skema RED dengan perdagangan karbon, mempresentasikan proposal pencegahan deforestasi mereka yang berdasarkan pendanaan publik pada Lokakarya SBSTA bulan September 2006 dan disajikan kembali pada UNFCCC COP12 bulan November 2006 (lihat bawah)<sup>5</sup>.

Agenda AD lebih mengemuka lagi dalam agenda perubahan iklim global dengan diterbitkannya “*Stern Review on Climate Change*” oleh pemerintah Inggris di awal 2007. Mantan ekonom Bank Dunia Sir Nicholas Stern menyarankan langkah pencegahan deforestasi harus dimasukkan dalam periode komitmen pasca 2012 Protokol Kyoto, namun mendesak bahwa aksi untuk mencegah deforestasi dalam skala besar harus dilakukan sesegera mungkin melalui skema percontohan pencegahan deforestasi untuk menguji metodologi dan mengatasi semua kesulitan teknis dan sosial yang masih ada. (Lampiran2)<sup>6</sup>.

**Bank Dunia bermaksud menjadi pemimpin badan global dalam pencegahan deforestasi:**

Bank Dunia selalu melakukan langkah cepat untuk menangkap (dan menciptakan) inisiatif global baru di mana aliran dana yang besar dari Utara ke Selatan bisa diduga—seperti yang telah mereka lakukan pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an bersama Global Environment Facility (dimana lembaga tersebut tetap menjadi badan pelaksana utama dan masih mengendalikan dana-dana perwalian). Demikian juga dalam pendanaan karbon internasional, Bank Dunia memainkan peranan yang penting<sup>7</sup>.

Pada tahun 2006 dan awal 2007, Bank Dunia menempatkan isu pencegahan deforestasi dan hutan karbon sebagai bagian utama dalam usulan mereka yang kontroversial mengenai dibentuknya sebuah “**Aliansi Hutan Global**” (GFA) bersama beberapa LSM konservasi besar, seperti Nature Conservancy, WWF, dan sektor swasta. Proposal mega-dana kehutanan ini, yang sejauh ini masih sangat sedikit didiskusikan bersama masyarakat sipil di luar kelompok LSM konservasi besar, akan dikelola oleh Bank Dunia dan bertujuan meningkatkan intervensi Bank Dunia pada sektor kehutanan di negara-negara berkembang (lihat Lampiran 3). Saat ini, Bank Dunia mengusulkan “**Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan**”(FCPF) yang akan ditempatkan di dalam proposal GFA mereka untuk “menguji kelayakan” dari beberapa pendekatan metodologi yang berbeda untuk skema pembayaran Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation* – REDD) (lihat diskusi berikut untuk perbedaan antara proposal RED dan REDD). Bank Dunia kini tengah mencari dukungan politis tingkat tinggi untuk rencana hutan karbonnya dan mencari proposal AD dari Negara industri G8 (Lampiran3).

## II Pendekatan umum dan khusus untuk pencegahan deforestasi

Pengamatan terhadap berbagai proposal pencegahan deforestasi dari pemerintah dan LSM menunjukkan bahwa kebanyakan mengemukakan alasan yang sama dan memasukkan elemen-elemen yang sama pula dalam rencana mereka untuk skema pencegahan deforestasi. Elemen-elemen tersebut adalah:

- Memberi kompensasi kepada pemerintah, sektor swasta, dan para pemilik hutan untuk melindungi hutan akan mendatangkan nilai ekonomi yang positif untuk mempertahankan hutan dan menekan penggundulan hutan untuk kepentingan lain
- Insentif ekonomi yang kuat diperlukan untuk menangkal penyebab utama deforestasi (mis. ekspansi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pengalihan fungsi hutan untuk pertanian, ekstraksi hidrokarbon, dll.)
- Negara-negara yang benar-benar dapat menunjukkan penurunan angka deforestasi atau menjaga cadangan karbon hutan (tutupan hutan) di atas target minimum yang disepakati akan menerima kompensasi melalui mekanisme-mekanisme pendanaan RED global dan/atau regional
- Verifikasi tutupan hutan dan laju deforestasi akan didasarkan pada kombinasi citra penginderaan jarak jauh melalui satelit yang didukung oleh verifikasi kondisi lapangan sebenarnya (kunjungan lapangan)
- Skema RED akan menggunakan pendekatan penghitungan karbon pada *tingkat nasional* atau *negara* (bukan penghitungan tingkat proyek) untuk memungkinkan perencanaan tata guna lahan nasional secara lintas-sektoral dan untuk mengurangi “biaya transaksi” monitoring dan verifikasi
- Kekhawatiran sebelumnya mengenai “penambahan”, “kebocoran” penghitungan karbon yang akurat dan verifikasi (Lampiran 1) akan berhasil diatasi melalui kemajuan teknologi penginderaan jarak jauh<sup>8</sup>, perkembangan metodologis dalam penghitungan karbon<sup>9</sup> dan penggunaan sistem satu negara atau “seluruh sistem hutan nasional” sebagai unit penghitungan (meskipun diketahui bahwa masih ada “masalah-masalah” ilmiah dan verifikasi yang perlu dipecahkan, diuji dan disetujui)
- Kandungan karbon hutan bukan merupakan jaminan permanen cadangan karbon, tetapi skema RED yang melindungi hutan yang ada bisa “memperpanjang waktu” dan mengurangi emisi CO<sub>2</sub> sementara strategi dan teknologi mitigasi yang lebih efektif tengah dikembangkan demi pengurangan emisi yang permanen<sup>10</sup>.
- Adanya kebutuhan akan “**aturan yang tegas**” yang akan menekan hilangnya hutan dari wilayah yang telah menjadi sasaran pendanaan AD atau terlibat dalam penggalangan pembayaran kompensasi untuk mengurangi deforestasi (sanksi keuangan dsb).<sup>11</sup>

Disamping adanya kesamaan di atas, proposal pemerintah dan LSM untuk pencegahan deforestasi memiliki sejumlah perbedaan dan perbedaan tersebut mungkin penting dalam debat publik mendatang dan negosiasi antar pemerintah dalam topik ini. Perbedaan pertama yang terlihat adalah menyangkut pilihan mekanisme-mekanisme pendanaan bagi skema ini.

### ***Pendekatan pendanaan publik***

Pemerintah Brazil mengusulkan pembentukan sebuah badan dana perwalian internasional yang akan memberikan kompensasi terhadap upaya pengurangan emisi dari deforestasi melalui kontribusi sukarela dari pemerintah negara-negara industri. Proposal lainnya, seperti pada inisiatif Protokol Kyoto 2 yang dilaksanakan oleh para aktivis lingkungan di Inggris, memberi rekomendasi agar dana-dana AD diperoleh melalui sejenis pajak yang dibebankan perusahaan industri ekstraktif berbasis karbon pada titik produksi (bukan emisi). Sebagian dari pendapatan pajak ini, katakanlah 10%

kemudian akan disalurkan kepada dana pencegahan deforestasi untuk memberi penghargaan kepada negara-negara yang melakukan upaya pengurangan emisi melalui konservasi hutan<sup>12</sup>. Pajak karbon semacam itu bisa menggalang miliaran dolar setahunnya yang sebagian kecilnya dapat disalurkan kepada dana global untuk menghambat atau menghentikan deforestasi.<sup>13</sup>

#### ***Pendekatan berbasis pasar***

The Coalition of Rainforest Nations and most conservation NGOs, and obviously carbon finance businesses, are pushing for compensated reduction financed through carbon emission ‘reduction’ credits.<sup>14</sup> These market advocates maintain that public international funds would never generate the required volume of funds to provide attractive and sustained economic incentives for developing countries to keep their forests standing. European governments tend to be more in favour of a trade-based scheme, presumably to increase volumes and reduce prices of pollution rights in the *EU Emission Trading Scheme* (ETS). The UK government, for example, is proposing that the rainforests of the Congo basin be protected through carbon trading:

‘...the challenge for the international community – for all of us – is to change the economic incentives facing the government (of DRC): to make it more rewarding to preserve forests than to cut them down. ***In the end, the only way we are going to do this is through a global carbon trading scheme .... So the (World) Bank needs to expand its work on sustainable rainforest management*** by piloting new ways to provide alternative incomes for people living in rainforests, rather than from cutting them down, as we move towards a system of carbon trading’ (emphasis added)<sup>15</sup>

#### ***Bank Dunia mendorong pasar karbon***

Meskipun Bank Dunia mendukung berbagai pendekatan sistem pendanaan untuk pencegahan deforestasi (lihat di bawah), secara umum Bank Dunia merupakan pionir utama dan pendorong perdagangan karbon. Seperti para pendukung pasar karbon lainnya, para ekonom Bank Dunia menegaskan bahwa hanya pasarlah yang dapat menghasilkan dana yang mencukupi upaya global yang efektif untuk menurunkan perubahan iklim. Pada kenyataannya, rencana pendanaan bagi usulan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan mengasumsikan pada tahun 2014 pendanaan tersebut hampir seluruhnya berasal dari dana-dana berbasis pasar (Lampiran 3).<sup>16</sup>

Pada tahun 2007, tampaknya terjadi konsensus diantara para pendukung pencegahan deforestasi bahwa diperlukan pendekatan gabungan untuk pendanaan RED.<sup>17</sup> Pendanaan publik (Bantuan Pembangunan Resmi/ODA) dapat digunakan mendanai skema percontohan awal untuk menguji metodologi dan untuk mendanai “inventarisasi karbon”, monitoring dan kebutuhan penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pekerjaan bantuan teknis bersama pemerintah. Sementara pada saatnya nanti pasar kredit karbon mungkin menyalurkan sebagian besar dana untuk pembayaran kompensasi pengurangan emisi (baik melalui skema perdagangan karbon sukarela atau dengan pengaturan).

Perbedaan mendasar kedua antara usulan-usulan AD adalah berkaitan dengan apa yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari skema-skema tersebut.

#### ***RED atau REDD?***

Beberapa pendukung AD berharap bukan saja dapat memasukkan pencegahan deforestasi, namun juga penurunan emisi dari pencegahan degradasi hutan yaitu, *Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). Para penganjur REDD berketetapan bahwa pendekatan ekosistem dan bentang alam yang sejati untuk menghindari deforestasi harus mencakup

baik hutan alam (belum ditebang) yang sehat maupun hutan yang telah rusak. Para penganjur REDD termasuk Koalisi Bangsa-Bangsa Hutan Tropis (CRN) dan Bank Dunia—yang rupa-rupanya berusaha memanfaatkan dana pencegahan deforestasi untuk membiayai proyek-proyek *offset* hutan tanaman mereka (yang banyak dikritik).

Negara-negara dengan laju deforestasi rendah sangat mendukung diberikannya imbalan AD bagi pemulihan dan “rehabilitasi” wilayah hutan karena angka penggundulan hutan di wilayah mereka tidak tinggi, bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Pemerintah India, misalnya, mencatat bahwa pembatasan pemberian imbalan terhadap upaya menurunkan deforestasi akan menjadi hukuman yang tidak adil bagi negara-negara yang memperluas tutupan “hutan”. India memperingatkan bahwa pembatasan kompensasi hanya untuk pencegahan deforestasi—dengan pembayaran berbasis *laju* deforestasi bisa menciptakan niat buruk pemerintah yang tidak bermoral untuk mempercepat deforestasi sebelum tahun 2012 atau mengancam untuk melaksanakan skema pengembangan pembukaan lahan yang mahal (palsu) untuk meningkatkan pembayaran kompensasi per hektar hutan.<sup>18</sup>

Negara seperti Indonesia yang telah memiliki lahan hutan gundul dan kerusakan hutan yang parah akibat industri kayu yang tidak lestari juga mendukung kegiatan penanaman kembali hutan dan “pemulihan” dibawah skema pencegahan deforestasi.<sup>19</sup> Perusahaan-perusahaan swasta yang terlibat dalam ekonomi karbon internasional juga berusaha memasukkan penanaman kembali hutan, skema perkebunan dan pembayaran untuk mengurangi penurunan fungsi hutan dalam REDD.

Kritik terhadap pendekatan umum untuk skema pembayaran “pencegahan deforestasi” menunjukkan bahwa sulit mengukur penurunan fungsi hutan. Dalam hal ini, kebanyakan ilmuwan setuju bahwa teknologi penginderaan jarak jauh yang ada mungkin tidak memadai untuk membuktikan kondisi penurunan fungsi hutan alam pada tingkat yang akurasi bisa diterima. Mereka yang tidak sependapat dengan dimasukkannya skema penanaman kembali hutan sebagai bagian dari kompensasi pencegahan deforestasi menunjukkan bahwa komponen pemulihan hutan seperti ini beresiko mengalami kebocoran dan permasalahan lainnya yang sama seperti yang dialami inisiatif perkebunan penyerap karbon (*carbon sink plantation*) (Lampiran 1). Ada pula keprihatinan bahwa dengan memasukkan penurunan fungsi hutan akan terdapat resiko munculnya masalah-masalah definisi yang hanya akan menghambat negosiasi UNFCCC yang efektif. Kelompok ini, termasuk Brazil, karenanya mengusulkan bahwa UNFCCC dan badan-badan internasional membatasi pemberian kompensasi atas pengurangan emisi (karbon) hanya kepada pencegahan deforestasi—RED.

#### ***Pijakan atau sasaran?***

Kebanyakan proposal AD pasar dan non pasar, termasuk dari Brazil, mengusulkan agar pembayaran kompensasi dilakukan sesuai dengan kinerja nasional. Hal ini akan ditentukan berdasarkan data-data yang didapatkan dari laju deforestasi rata-rata per tahun setiap negara, yang dikenal sebagai Rujukan Tingkat Emisi (*Reference Emission Rate/RER*). Beberapa perusahaan pendanaan karbon menganjurkan alternatif pendekatan pembatasan dan perdagangan (*cap and trade*). Dalam kerangka kerja tersebut, pembayaran akan dilakukan untuk menjaga kandungan karbon pada atau melebihi target yang didasarkan pada “perkiraan jumlah kandungan karbon yang tersimpan” di dalam “cadangan hutan karbon” suatu negara, yang selanjutnya akan memberi pilihan bagi negara tersebut untuk “menjual kredit dan memindahkan area hutan yang setara kepada **kawasan lindung**, atau terus melakukan kegiatan deforestasi atau kombinasi keduanya.”<sup>20(!)</sup>

### ***Jutaan dolar untuk hutan dan pelestarian hutan?***

Besarnya usulan uang yang dibutuhkan untuk mendanai skema RED dan membayar kompensasi negara sangat bervariasi, namun para pendukung RED menduga bahwa kemungkinan jumlah imbalan keuangan untuk mencegah deforestasi sangatlah besar. Menurut studi yang diselenggarakan oleh Stern Review di delapan negara yang bertanggung jawab atas 70% emisi yang berasal dari perubahan tata guna lahan, biaya peluang dari tata guna lahan alternatif berkisar antara 5-10 miliar dolar Amerika setiap tahunnya, jika seluruh deforestasi dapat dihentikan.

Secara global, Bank Dunia memperkirakan bahwa untuk menurunkan angka deforestasi di negara berkembang sebesar 20%, pencegahan deforestasi akan menelan dana antara 2 hingga 20 miliar dolar Amerika per tahun, dan harga dari penghentian deforestasi secara keseluruhan sebesar 100 miliar dolar Amerika tiap tahunnya! Dalam hal potensi pendapatan negara, perkiraannya sangat bervariasi. Meskipun demikian, sebagian besar prediksi memperkirakan imbalan yang besar untuk pelestarian hutan. Pada kasus DRC, misalnya, beberapa pengamat menyatakan bahwa kompensasi AD dapat menggalang dana 2,7 - 33 miliar dolar Amerika setiap tahun. Para pendukung fanatik AD menyatakan bahwa pendapatan per kapita, paling tidak di atas kertas, akan meningkat lebih dari 10% meskipun mereka gagal menjelaskan bagaimana warga negara akan benar-benar menikmati peningkatan pendapatan tersebut.<sup>21</sup> Pada kenyataannya, akan sangat tergantung pada biaya peluang yang spesifik untuk suatu tata guna lahan alternatif di area tertentu, Bank Dunia mengklaim bahwa pembayaran kompensasi pengurangan deforestasi berkisar pada angka 200 hingga 10.000 dolar Amerika per hektar hutan.<sup>22</sup>

### ***Siapa yang mendapat keuntungan dan menerima pembayaran kompensasi atau imbalan AD tersebut?***

Yang mengherankan, banyak proposal AD yang tidak secara jelas menyebutkan lembaga apa, kelompok atau perorangan yang akan menerima pembayaran kompensasi di bawah skema RED internasional. Kebanyakan proposal mengisyaratkan bahwa sebagian besar pembayaran akan diberikan kepada departemen pemerintah atau departemen keuangan, yang dengan demikian menyatakan bahwa paling tidak skema-skema ini akan diterapkan pada hutan yang dianggap oleh pemerintah dan pengadilan sebagai tanah “negara”. Proposal AD yang dibuat Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dana kompensasi bisa dibagikan kepada otoritas pengelola kawasan lindung, perusahaan kayu “bersertifikat” yang menerapkan manajemen hutan lestari (*sustainable forest management/SFM*), inisiatif memberantas *illegal logging*/penebangan liar, skema pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services/PES*) dan manajemen hutan berbasis masyarakat (*community-based forest management/CBFM*) – meskipun proposal Indonesia tidak menjelaskan secara terperinci kelompok mana atau orang yang akan menerima dana untuk inisiatif-inisiatif tersebut.<sup>23</sup>

### ***Dapatkah masyarakat adat dan komunitas lokal memperoleh manfaat?***

Dengan sedikitnya skema AD yang konkrit dalam pelaksanaannya di luar beberapa skema tingkat proyek yang dijalankan LSM (lihat di bawah), sejauh ini terdapat sedikit bukti empiris yang konkrit untuk menilai sejauh mana program AD dan RED dapat memberi manfaat bagi masyarakat di tingkat lokal. Studi-studi dari para ekonom dan para pendukung pembayaran untuk jasa lingkungan (PES) cukup optimis. Para ekonom PES menyatakan bahwa, berdasarkan pengalaman yang muncul dengan skema PES pada beberapa tempat di Amerika Latin, perolehan pendapatan bisa diharapkan jika syarat-syarat dan kondisi yang tepat dijalankan - khususnya pada “tanah marginal” bernilai ekonomi tinggi seperti area hutan pegunungan.<sup>24</sup>

The World Agroforestry Centre menunjukkan program-program Penghargaan bagi Kaum Miskin Pegunungan atas Jasa Lingkungan (*Rewarding Upland Poor for Environmental Services/RUPES*) mereka yang beroperasi di Indonesia, Nepal dan Filipina sebagai contoh yang positif.<sup>25</sup> Pada kasus komunitas adat yang masih menganut ekonomi subsisten dan barter, disarankan bahwa manfaat non ekonomi yang setimpal mungkin lebih tepat diberikan secara budaya, sementara komunitas adat yang pada taraf tertentu telah terbiasa dengan sistem pertukaran uang, bisa diberi kompensasi atau “imbalan” dengan pembayaran kecil dan teratur dalam bentuk dana masyarakat atau proyek masyarakat.<sup>26</sup>

Studi lain dengan skema PES di Brazil dan Bolivia mendapati program tersebut cenderung bersifat *top-down* dan mengalami “partisipasi para pihak yang tidak memadai” sehingga menimbulkan “kendala untuk berkelanjutan”.<sup>27</sup> Studi LSM independen mendapati temuan yang lebih mengkhawatirkan dalam proyek-proyek hutan karbon di dataran tinggi Amerika Selatan (Kotak 1) dimana skema pembayaran lingkungan dan hutan karbon telah berakhir dengan meninggalkan masyarakat dalam kondisi yang lebih buruk, berhutang dan terjebak dalam kewajiban hukum yang tidak menguntungkan kepada perusahaan pendanaan karbon dan perusahaan kehutanan karbon.<sup>28</sup> Kritik terhadap PES juga menunjukkan bahwa bentuk kehidupan dan “keanekaragaman hayati” (nilai keanekaragaman hayati, dll) yang dijadikan komoditi telah merusak budaya (non uang) lokal, nilai guna konservasi dan kelestarian.<sup>29</sup>30 Studi kasus masyarakat adat baru-baru ini, tentang skema perkebunan penyerap karbon mengungkapkan bahwa masyarakat adat sering kali terpinggirkan dan gagal menikmati manfaat dari suatu proyek.<sup>30</sup>

### III Inisiatif pencegahan deforestasi dan skema percontohan yang diusulkan

Saat ini terdapat sangat sedikit contoh skema AD dan RED, dan sebagian besar merupakan inisiatif percontohan sukarela yang didanai oleh LSM pembangunan dan konservasi. Contoh yang ada termasuk proyek TNC *The Climate Action Project* di Taman Nasional Noel Kempff Mercado di Bolivia<sup>31</sup> dan *Rio Bravo Conservation and Management Area* di Belize. IIED and CIFOR (Pusat Riset Kehutanan Internasional) telah memeriksa beberapa dari proyek tersebut dan menemukan kesimpulan yang berbeda.<sup>32</sup> Kebanyakan inisiatif AD yang ada belum dijajaki secara kritis oleh LSM keadilan sosial dan organisasi akar rumput.

Namun pada tahun 2007, inisiatif-inisiatif di tingkat nasional untuk mengembangkan metodologi AD dan pengukuran kadar karbon mulai menyatukan langkah. *The European Space Agency*, misalnya, membuat percontohan inventarisasi karbon dan pemantauan deforestasi menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh di Bolivia dan Kamerun.<sup>33</sup> Bank Dunia mengundang pemerintah Papua New Guinea, Kosta Rika dan Indonesia, badan regional di Brazil dan Republik Demokratik Kongo, untuk mendanai perlindungan hutan melalui pencegahan deforestasi. Bank Dunia mencoba membujuk negara-negara tersebut untuk menandatangani kesepakatan untuk membatasi emisi karbon dari deforestasi pada tahun 2009 atau 2010, sebagai imbalan dari investasi sebesar 250 juta dolar Amerika.<sup>34</sup>

Inisiatif oleh pemerintah regional dan lokal juga muncul di Asia dan Amerika Latin, dan beberapa negara maju menyediakan dana regional untuk pencegahan deforestasi. Pada bulan April 2007, pemerintah Australia mengumumkan dana 160 juta dolar Amerika untuk penanaman kembali hutan dan pencegahan deforestasi di wilayah Asia Pasifik. Pada akhir April, gubernur provinsi Aceh dan Papua serta Papua Barat di Indonesia mengeluarkan pernyataan ketertarikan mereka akan skema pencegahan deforestasi dan berjanji bahwa hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal akan dihormati pada setiap program yang mereka terapkan. Para gubernur tersebut bahkan mengusulkan bahwa mereka mungkin bisa melakukan penanguhan industri *logging* di provinsi mereka apabila dana dari AD dapat benar-benar diwujudkan.<sup>35</sup>

Pada saat yang sama, di bulan April 2007, pemerintah Ekuador telah menyatakan secara luas bahwa mereka mau membatalkan ekstraksi minyak dan gas di dalam area hutan tropis yang dilindungi sebagai imbalan kompensasi untuk mencegah deforestasi dan pemeliharaan cadangan karbonnya baik di atas dan di bawah tanah.<sup>36</sup>

Walaupun skema tingkat nasional belum lagi dikembangkan namun tampak jelas bahwa momentum untuk melakukan suatu intervensi AD skala besar mengalami peningkatan dan negara-negara tropis, tidak termasuk anggota Koalisi Bangsa-Bangsa Hutan Tropis (yang lebih menyukai pendekatan berbasis pasar untuk mendanai AD), sudah bersiap-siap ambil bagian dalam setiap skema percontohan yang didanai secara internasional dan tampaknya tidak lama lagi Bank Dunia akan menandatangani kesepakatan dengan para pemerintah tersebut.

#### IV Keprihatinan tak terjawab mengenai hak, keadilan, akuntabilitas dan penghidupan

Selain resiko yang jelas ada, terdapat juga potensi manfaat yang dapat diperoleh masyarakat adat dan komunitas yang bergantung hidupnya pada hutan jika hutan menjadi bagian dari skema internasional penurunan emisi gas rumah kaca yang terjadi karena deforestasi. Kebanyakan proposal RED yang ada saat ini menyebutkan perlunya “partisipasi” masyarakat dan tersedianya manfaat lokal bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Kajian Stern menyebutkan perlunya mengatasi masalah hak-hak dan tanggung jawab masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (Lampiran 2). Kedua proposal dari Bank Dunia, yaitu GFA dan FCPF, menyebutkan dukungan bagi sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat, tapi apa artinya dalam kehidupan nyata? Pengalaman di India menunjukkan bahwa dalam beberapa hal skema semacam ini telah meningkatkan kontrol negara terhadap hutan dan juga meningkatkan campur tangan paksa pemerintah terhadap sistem adat setempat mengenai kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya alam<sup>37</sup>.

##### ***Resiko sosial yang berkaitan dengan proposal AD saat ini:***

Meskipun isu-isu sosial dan pemberantasan kemiskinan disebutkan di hampir seluruh proposal AD, tetapi biasanya hanya sedikit yang merinci *bagaimana* hak-hak masyarakat akan sepenuhnya dijunjung tinggi dan dijaga, dan *bagaimana* manfaat lokal yang adil dan berkelanjutan dapat dijamin di bawah skema RED.

##### ***Kebijakan kehutanan yang top-down dan tidak lestari?***

Pada tataran ini, mayoritas proposal AD berasal dari Bank Dunia, pemerintah dan LSM konservasi besar. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa setiap rencana global untuk menyelamatkan hutan dunia dirancang tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta komunitas lokal niscaya mengalami kegagalan dan pengambilan keputusan yang bersifat top-down seperti ini sering kali mengukuhkan situasi *status quo* yang tidak adil dalam politik kehutanan pada tingkat internasional, nasional dan lokal.

Satu contoh utama solusi global yang telah gagal sebelumnya adalah Rencana Aksi Kehutanan Tropis (*Tropical Forestry Action Plan/TFAP*) yang dirancang oleh Bank Dunia dan FAO pada tahun 1980-an dan dilaksanakan pada awal 1990-an, yang pada waktu itu melibatkan tidak kurang dari 73 pemerintahan negara berkembang.

Meskipun TFAP banyak berbicara tentang partisipasi dan mata pencaharian lokal, namun program itu pada akhirnya lebih melayani kepentingan badan-badan pemerintah dan industri kayu, meski program tersebut mengklaim mendukung “hutan kemasyarakatan”. Pengalaman TFAP secara jelas menunjukkan kesalahan membangun kebijakan kehutanan secara top-down dan bahwa solusi yang lestari hanya dapat dicapai secara *bottom-up* (dari bawah), dari para pemangku hutan dan masyarakat yang secara nyata hidup di dalam hutan dan bergantung pada hutan.<sup>38</sup>

Namun, paling tidak sejauh ini, tidak terlihat sama sekali bahwa masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan telah diajak berdiskusi mengenai resiko dan manfaat potensial dari rencana “pencegahan deforestasi” yang tengah dikumandangkan oleh pemerintah bersama-sama dengan badan-badan internasional. Inisiatif global yang dipercepat untuk mendorong penggunaan bahan bakar nabati sebagai bagian dari langkah mitigasi perubahan iklim mendapat

kritikan tajam dari masyarakat adat dan LSM karena gagal menjamin terselenggaranya konsultasi publik yang layak.<sup>39</sup> Terdapat bahaya bahwa gerakan cepat untuk mengadopsi langkah-langkah kebijakan global AD mungkin juga dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai potensi dampak sosial dan HAM, dan tanpa sepengetahuan dan partisipasi para pemangku hak yang berpotensi terkena dampak.

Pada Tahun 2007, kesepakatan internasional tentang hutan *masih* sedang dinegosiasikan antara Bank Dunia dan para pemerintah negara berkembang tanpa sepengetahuan atau keterlibatan masyarakat yang tinggal di hutan di negara yang bersangkutan. Ini bahkan terjadi setelah Bank Dunia berkali-kali dikecam secara luas karena kegagalan mereka untuk melibatkan para pemangku hak dalam intervensi Bank Dunia pada isu hutan di negara-negara berkembang (seperti yang terjadi baru-baru ini di DRC dimana Bank Dunia mendukung penebangan kayu berskala industri dan pembentukan Aturan Kehutanan/*Forest Code* yang baru tanpa partisipasi yang memadai dari masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan lainnya).<sup>40</sup>

#### **Konservasi penyingkiran dan anti-masyarakat**

Terdapat resiko nyata bahwa dimana dana-dana RED digunakan untuk mendukung dan *memastikan* perlindungan hutan, sejumlah besar dana akan dipakai oleh negara untuk melengkapi lembaga-lembaga perlindungan hutan dengan sejumlah mobil jeep, *walkie talkie*, persenjataan, helikopter dan GPS dengan pendekatan “senjata dan penjaga” yang merupakan cara-cara lama yang anti-masyarakat untuk perlindungan hutan. Dengan cara yang sama, muncul bahaya serius bahwa uang RED bisa *menguukuhkan* kontrol negara dan sektor swasta atas hutan yang pada akhirnya hanya akan mendukung model perlindungan hutan yang tidak adil dan sudah usang.

Meskipun telah terjadi perubahan di mana pada tingkat internasional secara normatif telah menerima pendekatan konservasi hutan dan kawasan lindung yang lebih berpusat pada masyarakat sebagai akibat dari tekanan aktivis HAM dan masyarakat adat, pada kenyataannya di banyak negara terutama di beberapa negara Afrika dan Asia, terus terjadi penyingkiran terhadap hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Negara-negara tersebut masih menerapkan pendekatan diskriminatif dan anti-masyarakat untuk perlindungan hutan yang memberi sanksi dan mengkriminalkan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.<sup>41</sup>

Imbalan keuangan AD yang cukup besar bisa mendorong lembaga-lembaga kehutanan Negara dan otoritas kawasan lindung untuk menegakkan secara berlebihan peraturan-peraturan perlindungan hutan yang tidak adil melalui tindakan-tindakan yang menjadikan kelompok-kelompok marginal dan rentan sebagai sasaran, termasuk masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang hidupnya bergantung pada hutan.<sup>42</sup>

Dalam skenario terburuk, di beberapa bagian Asia dan Afrika, dana RED beresiko untuk dialihkan ke dalam program pemukiman paksa masyarakat hutan yang hidup mengembara atau setengah menetap, atau untuk memaksa peladang berpindah berubah menjadi peladang tetap atas nama “penghidupan alternatif yang lestari” (bukan berbasis hutan). Praktik semacam ini dapat melanggar hak masyarakat atas budaya dan penghidupan, melemahkan ketahanan pangan dan merusak praktik-praktik tradisional mereka.<sup>43</sup> Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi didasarkan pada kejadian nyata di wilayah hutan saat ini (mis, pengusiran paksa di dataran tinggi di Thailand). Jika skema AD mendukung skema relokasi semacam ini, maka skema AD akan mengganggu kewajiban hukum negara-negara anggota Konvensi Keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) dan berbagai konvensi HAM lainnya, termasuk Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial*

*Discrimination*/CERD) untuk melindungi pemanfaatan secara adat atas sumber daya hayati serta pengetahuan tradisonal.

**Kotak 1: Dampak kehutanan karbon terhadap masyarakat adat dan komunitas pedesaan di pegunungan Andes Ekuador.<sup>44</sup>**

Proyek-proyek perkebunan pengimbang-karbon yang dilaksanakan secara sukarela di dataran tinggi Ekuador mengungkapkan serangkaian potensi dampak sosial, ekonomi dan mata pencaharian pada masyarakat adat dan komunitas lokal yang mengikuti proyek ini dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa tahun proyek ini berjalan, masyarakat mengeluh bahwa mereka:

- Tidak pernah mendapat informasi yang jelas dari perusahaan kehutanan karbon tentang pembayaran bersih sebenarnya yang akan mereka terima per hektar (mereka hanya diberitahu jumlah kotor pembayaran per hektar tanpa penjelasan bahwa ada biaya pengurangan: mereka tidak diberitahu bahwa biaya-biaya teknis perusahaan untuk melakukan penanaman, pelatihan, pengawasan dan sertifikasi akan *diambil* dari pembayaran kotor per hektar)
- Tidak mendapat informasi mengenai resiko sosial dan ekonomi, biaya yang akan muncul dan kewajiban hukum mereka dalam proyek tersebut
- Belum diberitahu tentang kegunaan atau pengetahuan tentang kredit karbon bersertifikat dan bagaimana hal tersebut menghasilkan pemasukan bagi perusahaan
- Tidak mendapat penjelasan tentang klausul penalti dalam kontrak sebelum anggota komunitas dan pimpinan adat menandatangani perjanjian jangka panjang
- Menjadi korban manipulasi atau pelanggaran dari peraturan mereka sendiri tentang persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan
- Mengalami pengusuran dari lahan penggembalaan masyarakat karena lahan tersebut diberikan untuk proyek (berdasarkan janji yang tidak akurat dan sepotong-sepotong tentang potensi keuntungan)
- Harus menghabiskan sebagian besar dari pembayaran mereka yang tidak seberapa untuk membayar ahli dari luar untuk melakukan pekerjaan teknis yang tercantum dalam kontrak
- Menanggung keterlambatan pembayaran oleh perusahaan atas kerja yang mereka telah selesaikan tepat waktu dan sesuai kontrak
- Dalam banyak kasus, tidak menerima tingkat pendapatan dan pekerjaan sebagaimana telah dijanjikan
- Pada beberapa kasus mengalami kondisi yang semakin parah, terbelit hutang untuk membayar penalti kontrak atas kegagalan memnuhi kewajiban (mis, karena kerusakan perkebunan akibat kebakaran)
- Menerima sanksi pembayaran denda yang besar dibawah klausul penalti kontrak
- Beberapa komunitas terbelit *hutang* akibat kesalahan pencatatan keuangan perusahaan yang melakukan “kelebihan pembayaran” untuk pekerjaan kehutanan tertentu dan menuntut pengembalian pembayaran
- Terpaksa menanggung hampir *seluruh* biaya siluman dari kegiatan ini (mengganti persemaian yang gagal tumbuh dsb)
- Dalam suatu kasus mendapat ancaman (palsu) dari pegawai perusahaan bahwa tanah nenek-moyang mereka mungkin harus disita sebagai penalti atas kegagalan menjalankan kegiatan kehutanan yang telah ditentukan dalam kontrak
- Telah mengajukan keluhan dan pertanyaan mengenai pengeluaran dan pencatatan keuangan perusahaan yang tidak pernah dijawab oleh para pegawai perusahaan

### ***Pelanggaran hak-hak adat atas tanah dan resiko konflik-konflik pertanian***

Di banyak negara yang memiliki hutan tropis, negara tidak mengakui hak-hak adat kolektif masyarakat adat terhadap hutan leluhur mereka, atau hanya mengakui sebagian kecil dari tanah-tanah adat mereka – dan selebihnya secara hukum mendefinisikan hutan yang tersisa sebagai “tanah negara”.<sup>45</sup> Isu ini sangat penting, sebab kelihatannya pembagian zona hutan dibawah skema pembayaran RED dan tiap rencana pembagian keuntungan dibawah kontrak RED sebagian akan ditentukan oleh hak-hak kepemilikan tanah.

Terdapat resiko nyata bahwa pemerintah, perusahaan dan LSM konservasi akan “melakukan zonasi” (membagi) hutan ke dalam batas-batas kawasan lindung, dengan menarik garis area dilindungi, koridor biologi, cagar alam dan zona-zona pengelolaan hutan lestari (penebangan bersertifikat) untuk menerima pembayaran AD yang akan menyingkirkan atau merugikan masyarakat tradisional.

Jadi, potensi permasalahan yang sama menyangkut perencanaan tata guna lahan secara *top-down* dan zonasi hutan juga ada dalam skema RED, seperti halnya pendekatan lain yang berdasarkan pada zonasi tata guna lahan dan klasifikasi lahan- seperti penerapan konsep *High Conservation Value* atau “hutan kritis”.<sup>46</sup> Melihat kapasitas pendapatan potensial dari tegakan hutan yang ada, beberapa negara mungkin akan menjadi lebih enggan untuk mengakui hak kepemilikan adat dari masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap tanah hutan. Pembayaran kompensasi RED kepada pemerintah dapat menciptakan kendala bagi hutan dan usaha konservasi serta bagi aparat negara untuk menyelesaikan sengketa tanah yang telah berlangsung lama di kawasan hutan.

Terdapat pula ancaman bahwa tingkat kompensasi yang relatif menjanjikan untuk setiap hektar hutan akan mendorong spekulasi lahan pada hutan-hutan yang tersisa, terutama di daerah pedalaman. Karenanya skema RED beresiko mendorong perampasan tanah adat.

Ada pula resiko bahwa Negara dan pemerintah akan mengumbar janji kepada publik untuk menghormati hak-hak adat sebatas retorika belaka, namun dalam kenyataannya memakai dana AD untuk mengukuhkan kebijakan dan model perlindungan hutan konvensional yang tidak adil yang ada saat ini..Misalnya pada kasus di Papua Barat yang tersebut di atas, gubernur menyatakan mereka akan menghormati hak-hak adat, namun berjanji bahwa dana-dana akan digunakan untuk melengkapi keperluan polisi hutan.

### ***Meningkatnya ketidakadilan dan konflik sosial***

Demarkasi hutan secara *top-down* di bawah skema RED bisa memicu konflik tata batas dan konflik kepentingan baik antar maupun sesama pemilik lahan pedesaan dan pemilik hutan. Timbul pula resiko bahwa tanpa tindakan yang cermat untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil di daerah pedesaan, pembayaran AD bisa menimbulkan ketegangan di antara komunitas tersebut atau rumah tangga yang menerima pembayaran dan mereka yang tidak diikuti dalam skema pembayaran, yang mungkin termasuk mereka yang tidak memiliki bukti formal kepemilikan tanah dan mereka yang tidak mempunyai tanah. Dengan kata lain, kompensasi AD bisa meningkatkan ketidakadilan di area hutan desa dan beresiko menciptakan konflik intra dan inter masyarakat.

### ***Korupsi dan penipuan***

Sejumlah besar uang yang digunakan dalam skema RED juga memunculkan resiko korupsi yang nyata – khususnya mengingat beberapa negara tropis dengan tingkat deforestasi paling parah merupakan negara-negara paling korup di dunia. Bahkan dimana korupsi dan penggelapan bisa dihindari dan dikendalikan, masih tetap ada resiko bahwa keuntungan terbesar akan didapat oleh

badan-badan negara, pemerintah lokal dan LSM konservasi ketimbang masyarakat dan komunitas lokal – sebagaimana terjadi di beberapa area percontohan skema pencegahan deforestasi di Taman Nasional Noel Kempff di Bolivia.<sup>47</sup> Yang tak kalah buruknya, ketika perusahaan, LSM dan badan-badan negara mungkin memperoleh pendapatan, biaya langsung untuk perlindungan hutan mungkin lebih banyak jatuh ke tangan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memanfaatkan sumber daya tersebut, yang mungkin menghadapi pembatasan perburuan, mencari ikan dan praktik perladangan berpindah sebagai akibat kebijakan-kebijakan perlindungan area hutan yang bersifat konvensional dan meminggirkan masyarakat (sebagaimana terjadi di Noel Kempff).

### ***Pengaturan kontrak yang tidak adil***

Bahkan bila masyarakat mampu melakukan negosiasi mengenai manfaat langsung dari skema AD yang menyangkut tanah-tanah hutan tradisional mereka, bukanlah jaminan bahwa negosiasi akan berlangsung adil. Terdapat bahaya bahwa kompensasi dan kontrak konservasi ditulis untuk menguntungkan perusahaan atau Negara atau LSM konservasi dan membebankan biaya-biaya yang tidak perlu atau tugas konservasi kepada anggota komunitas lokal, para pemimpin mereka dan organisasi-organisasi mereka – seperti yang terjadi pada kontrak hutan karbon dengan masyarakat adat di dataran tinggi Ekuador (Kotak 1).

Resiko-resiko tersebut di atas mendorong munculnya sederet pertanyaan yang sebagian besar tetap tidak terjawab oleh pemerintah dan para LSM pendukung skema pencegahan deforestasi:

- Jaminan apa yang akan diberikan RED untuk memastikan program-program pencegahan deforestasi sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dari masyarakat adat dan penduduk hutan lainnya?
- Bagaimana RED akan menjamin bahwa para pemilik tanah tradisional dan komunitas akan menerima imbalan atas perlindungan hutan yang mereka lakukan dan tidak diusir dari hutan tersebut?
- Bagaimana hak atas tanah adat dan klaim-klaim tanah yang belum terselesaikan akan diatur dibawah kebijakan dan aturan AD?
- Akankan hak masyarakat adat atas FPIC dihormati dengan sungguh-sungguh? Bagaimana persoalan tentang persetujuan yang dimanipulasi dan direayasa akan diatasi?
- Apa yang dapat menghentikan para penguasa dan para elit yang korup di tingkat nasional menghisap bagian terbesar dana-dana serta manfaat bagi keuntungan pribadi atau agenda politik mereka sendiri?
- Bagaimana program-program nasional atau sub-nasional yang ekstensif di area hutan tertentu mengatasi “berbagai penyebab” mendasar deforestasi yang berbeda? Siapa dan bagaimana faktor penyebab ini akan diidentifikasi?
- Siapa di antara pemilik hak dan badan perwakilan yang terkait, yang akan memiliki hak melakukan negosiasi kontrak dan nilai kompensasi terhadap area mana dari hutan dan dengan syarat apa saja dan menurut kriteria dan aturan siapa?
- Bagaimana kriteria dan aturan nasional dan internasional untuk mengakses skema AD akan disepakati dan ditentukan dengan cara-cara yang partisipatif dan adil?
- Bagaimana warga negara dan pemangku hak dapat yakin bahwa aturan yang sempit dan tidak adil tidak akan dibuat oleh pemerintah, perusahaan, LSM dan konsultan kehutanan yang sebagian besar akan menguntungkan kelompok-kelompok tersebut?
- Jika masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif mampu melakukan negosiasi kontrak: bagaimana mencegah terjadinya negosiasi yang asimetris (tidak sepadan) yang bisa mengunci mereka kedalam kewajiban kontrak yang tidak adil?
- Siapa yang akan “menanggung” biaya AD siluman dan tak terduga jika kontrak dilanggar (dan karbon kompensasi jadi hilang)?

- Jika hutan karbon di tingkat proyek dengan susah payah berusaha memecahkan kerumitan pengelolaan hutan letari, bagaimana kompleksitas sosial dan budaya ini dapat secara efektif dipecahkan pada skema RED di tingkat nasional?
- Bagaimana kebijakan-kebijakan AD akan menangani aspek permintaan yang mendorong deforestasi hutan tropis?
- Bagaimana kebocoran lintas batas (internasional) antara negara-negara yang berpartisipasi dan yang tidak dapat dicegah atau paling tidak diminimalkan?
- Jika skema-skema AD melibatkan pengambilan keputusan dan perencanaan tentang hutan di tingkat nasional, bagaimana partisipasi penuh warga negara dan masyarakat adat bisa dijamin?

***Kritikan ilmiah dan etis atas perdagangan karbon yang belum terselesaikan:***

Di luar seluruh pertanyaan yang wajar mengenai keberlanjutan sosial dari skema global dan nasional untuk memberi kompensasi atas pencegahan deforestasi, masih tersisa pertanyaan yang mengusik tentang proposal RED tersebut yang mendukung pendanaan melalui perdagangan karbon. Sementara hubungan antara pemerintah-masyarakat sering kali masih tidak selaras dan condong pada kepentingan badan-badan pemerintah, negosiasi dengan perusahaan juga kerap kali tidak adil seperti tergambar pada kasus PROFAFOR di Ekuador (Kotak 1).

Mendapatkan penghasilan dari perusahaan dan pasar perdagangan karbon dunia juga bisa memunculkan isu-isu etis yang serius pada masyarakat dan komunitas-komunitas adat. Ini terutama disebabkan karena sepertinya sejumlah besar pembayaran kredit karbon akan mengalir dari kepentingan-kepentingan industri dan korporasi yang sama yang terus mengeduk bahan bakar fosil di mana-mana, kadang kala di tanah-tanah leluhur masyarakat adat – dengan taruhan besar pada kondisi lingkungan, kesejahteraan dan kesehatan mereka. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan energi transnasional tersebut melibatkan diri dalam perdagangan karbon terutama hanya untuk membeli hak untuk terus *mencemari*.<sup>48</sup> Bagi kebanyakan masyarakat adat, kontradiksi tersebut sangat meresahkan dan mungkin beresiko menyebabkan konflik dan perpecahan di dalam dan di antara masyarakat.

## V Langkah selanjutnya?

Memang membingungkan ketika para pemimpin dunia, delegasi pemerintah pada UNFCCC dan LSM besar sibuk mempromosikan pencegahan deforestasi di tingkat dunia, secara mengejutkan hanya sedikit yang dapat memberikan penjelasan yang lengkap bagaimana menjawab keprihatinan-keprihatinan yang disebutkan di atas. Pada beberapa kasus, resiko-resiko tersebut bahkan tidak dipedulikan sama sekali, misalnya, ketika beberapa aktivis perubahan iklim dan koalisi LSM seperti CANI menjadi begitu terobsesi dengan target, pemantauan, pengukuran dan implementasi penurunan gas rumah kaca (GHG) sehingga mereka lupa memperhatikan hakekat sosial dan teknologi dari krisis iklim, dan juga keprihatinan yang lebih luas dan pelajaran yang bisa didapat dari sejarah penyusunan kebijakan hutan internasional. Sementara isu perlindungan keanekaragaman hayati telah disebut-sebut, isu HAM dan isu sosial amat jarang diutarakan<sup>49</sup>. Pada kasus-kasus terburuk, isu sosial yang mengemuka dianggap oleh para pendukung AD berbasis pasar sebagai “isu sampingan”<sup>50</sup> atau bahkan lebih parah lagi dianggap sebagai “pengacau” dari tugas inti yang ada: menyelamatkan bumi.

Semua pelajaran tentang penyusunan kebijakan kehutanan dan lingkungan dan pembangunan selama abad terakhir ini seharusnya mengingatkan kita bahwa isu sosial dan isu hak adalah hal yang mendasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memasatkan tindakan-tindakan efektif untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan melindungi sumber daya hayati dan ekosistem. Apakah kita tidak menarik pelajaran ini?

Selagi pemerintah dan badan-badan internasional sibuk membentuk skema percontohan pencegahan deforestasi, mereka harus diingatkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan HAM dan memenuhi komitmen internasional dibawah pakta-pakta lingkungan. Melindungi hak asasi manusia menjadi jauh dari sekedar “pekerjaan sampingan” dari tujuan global utama dalam memerangi perubahan iklim: pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan hak asasi manusia.

Para pendukung AD yang mengakui bahwa isu-isu sosial, hak, sumber penghidupan, penguasaan dan keadilan merupakan hal-hal penting dalam kebijakan AD, sering menunjuk standar sertifikasi yang muncul seperti *Standar Emas WWF*<sup>51</sup> atau standar-standar Iklim, Komunitas dan Keragaman Hayati (*Climate, Community and Biodiversity/CCB*<sup>52</sup>) yang dikembangkan untuk kehutanan karbon dan proyek-proyek PES oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan LSM sebagai cara untuk menghadapi isu-isu sosial dan usaha-usaha perlindungan dalam skema AD di masa depan. Pendekatan-pendekatan sertifikasi ini tampaknya juga merupakan pendekatan yang lebih disukai kelompok Bank Dunia.

Masalah dengan ketergantungan pada standar-standar sertifikasi ini adalah bahwa sebagian besar dari standar itu bersifat *sukarela* dan tidak memaksa dan banyak dari standar-standar itu, seperti standar CCB, tidak diuji secara luas di lapangan.<sup>53</sup> Dalam hubungannya dengan penggunaan sertifikasi untuk ekstraksi kayu yang lestari dalam hutan-hutan, jelas bahwa bahkan standar yang paling baik sekalipun sering tidak diimplementasikan dalam praktik kehutanan. Standar-standar *Forest Stewardship Council (FSC)*, contohnya – yang seharusnya menghargai kepemilikan tanah adat dan menjunjung prinsip-prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan – sangat kurang di Indonesia, Guyana, Kamerun dan di tempat-tempat lain.<sup>54</sup>

Yang lebih parah adalah para investor sektor swasta, bank swasta dan Bank Dunia semua akan menerima janji perusahaan penebangan untuk peningkatan ke arah standar FSC supaya mereka memenuhi syarat bagi pendanaan mereka *bahkan ketika perusahaan-perusahaan itu tidak memenuhi standar yang ditentukan saat itu*. Pendekatan bertahap ini beresiko bahwa pembayaran atau bonus AD yang dibayarkan kepada perusahaan besar pemegang konsesi kehutanan untuk praktik-praktik yang seharusnya lestari yang kemungkinan *tidak* dilaksanakan dimasa yang akan datang. Ada resiko serius di sini bahwa dana AD akan dihabiskan untuk “omong kosong” dan janji-janji palsu kecuali jika pengawasan sertifikasi, verifikasi dan mekanisme pemenuhannya diperketat secara nyata.

Secara keseluruhan ketika dihadapkan dengan tantangan-tantangan dalam membuat skema AD yang berkelanjutan, kelompok pakar pembangunan sosial dan kehutanan seperti ODI dan CIFOR hanya menyatakan bahwa “standar-standar sosial” perlu dikembangkan untuk pencegahan deforestasi dan kehutanan karbon, termasuk perlunya melakukan penilaian dampak sosial.<sup>55</sup> Jelaslah, basa-basi dalam komitmen sosial dibawah kebijakan AD ini tidak memadai.

Sebagai langkah pertama untuk menghadapi kesenjangan dalam perdebatan kebijakan AD, rasanya penting bagi masyarakat adat dan gerakan hutan diseluruh dunia memulai dialog internal yang serius mengenai pro dan kontra skema pencegahan deforestasi yang dijalankan oleh pemerintah dan Bank Dunia. Dapatkah skema ini memperkuat hak-hak kepemilikan dan hak-hak adat atas sumber daya, atau apakah skema hanya akan menguatkan *status quo* saat ini di atas kerugian masyarakat adat dan komunitas lokal? Jika skema itu dapat memberikan manfaat yang sungguh-sungguh bagi komunitas lokal, jaminan minimum apa yang dibutuhkan untuk membantu memastikan ini? Jika resiko dan tantangan yang teridentifikasi dalam dialog ini tidak dapat terjawab, bagaimana masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta pendukung mereka dapat menghentikan pemerintah dan badan-badan internasional menyetujui perjanjian yang berdampak buruk bagi masyarakat ini?

Beberapa tindak lanjut untuk menghadapi isu penting bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan di daerah tropis termasuk aksi untuk memastikan:

- Masyarakat adat dan gerakan kehutanan terlibat secara langsung dalam pembicaraan internasional dan nasional mengenai kebijakan AD/RED, mekanisme dan pendekatan yang memungkinkan di masa mendatang
- Hak asasi manusia; persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC); penghargaan terhadap tanah adat dan hak-hak atas sumber daya; jaminan kepemilikan tanah; pembagian manfaat secara adil dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditempatkan sebagai isu sentral dalam diskusi kebijakan AD
- Jaminan di masa mendatang bahwa hak-hak adat akan diakui dan dihargai
- Kebijakan-kebijakan AD internasional dan nasional mengenai hutan mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk konservasi dan pengelolaan hutan yang lestari
- Jaminan bahwa masyarakat adat akan menguasai dan memperoleh kembali kontrol atas hutan mereka dan menerima dukungan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sesungguhnya.<sup>56</sup>
- Dialog dengan pendukung AD dilakukan dengan itikad baik dan membicarakan baik potensi manfaat yang didapat dari skema tersebut *dan* berbagai resikonya, termasuk problem-problem etika (dari dana-dana pasar) dan keterbatasan yang ada serta kesenjangan ilmiah (seperti kebocoran transnasional, masalah-masalah pengukuran)
- Setiap proses untuk mengidentifikasi faktor pendorong deforestasi di tingkat lokal dan nasional di negara-negara tropis dan keputusan mengenai faktor-faktor pendorong dan penyebab utama

yang mana yang harus ditangani untuk mencegah deforestasi tersebut harus melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dan komunitas yang bergantung pada hutan

- Setiap bentuk standar yang diusulkan dan aturan untuk skema AD di tingkat internasional dan nasional melibatkan sepenuhnya masyarakat adat dan komunitas lokal yang berpotensi terkena dampak dan taat sepenuhnya pada hukum internasional

Pendek kata, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan kebijakan mitigasi perubahan iklim global mengenai pencegahan deforestasi dirumuskan dengan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan para pemangku hak yang berpotensi terkena dampak. Tindakan-tindakan efektif untuk menangani perubahan iklim dan krisis lingkungan lain harus mencakup pembuatan kebijakan yang demokratis dan terdesentralisasi yang melibatkan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil dalam identifikasi dan pelaksanaan solusi yang lestari.<sup>57</sup>

## Lampiran 1 Hutan dalam negosiasi-negosiasi kebijakan perubahan iklim global di waktu lalu

Selama negosiasi antar pemerintah yang berliku-liku dalam periode pertama komitmen Kyoto (2008-2012), pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah proyek-proyek untuk melindungi hutan alam seharusnya tercakup dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) di UNFCCC atau tidak, telah menimbulkan debat yang hangat. Setelah negosiasi yang intensif, hutan alam akhirnya tidak termasuk dalam CDM. Hanya proyek-proyek penanaman kembali hutan dan proyek-proyek “kompensasi” dalam bentuk perkebunan penyerap karbon yang akhirnya (dan secara sangat kontroversial) dinyatakan memenuhi syarat untuk kredit karbon dibawah aturan CDM – meskipun sangat ditentang oleh masyarakat adat, organisasi-organisasi keadilan sosial dan beberapa LSM lingkungan yang mengkhawatirkan masalah-masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan perkebunan penyerap karbon.<sup>58</sup>

Tidak dimasukkannya hutan dalam CDM berakar dari kombinasi keprihatinan etika dan ilmiah yang diangkat oleh beberapa LSM dan para ilmuwan, dan penolakan keras dari pemerintah seperti Brazil karena alasan-alasan yang sebagian terkait dengan politik perdagangan global. Pada waktu itu, kritik menunjuk bahwa “cadangan” karbon hutan bersifat tidak permanen dan bahwa cadangan itu bisa rusak atau “bocor” karena kebakaran hutan baik yang sengaja dibuat manusia maupun tidak dan bahkan oleh bencana alam.<sup>59</sup> Kritik juga mencatat bahwa perlindungan hutan yang efektif dalam satu tempat mungkin akan memindahkan deforestasi dan aktivitas konservasi lahan ke lokasi lain dalam negara yang sama sehingga gagal menjamin “pertambahan” (penurunan bersih) dalam mengontrol emisi GHG. Kesulitan teknis yang sangat nyata dalam mengukur dan memonitor secara akurat dan objektif perubahan dalam persediaan karbon di hutan juga disoroti.

### ***Pandangan Masyarakat Adat:***

Masyarakat adat menyebutkan bahwa mereka terkena dampak langsung dari perubahan iklim di lingkungan mereka, terutama di daerah tropis, di Kutub Utara dan ekosistem-ekosistem rentan lainnya. Deklarasi-deklarasi adat, seperti Deklarasi Kimberly 2002, sudah memperingatkan berulang kali kepada pemerintah mengenai dampak-dampak yang merusak dari perubahan iklim dan menyerukan aksi besar untuk menghadapi ancaman pemanasan global.<sup>60</sup> Di Amazone, Badan Koordinasi Organisasi Adat Lembah Sungai Amazone (COICA) didirikan melalui usaha swadaya dari Aliansi Iklim (*Climate Alliance*) dengan rakyat dari kota-kota di Eropa pada tahun 1990. Kemitraan ini didasarkan pada prinsip hutang lingkungan dan dukungan bagi masyarakat adat untuk melindungi cadangan karbon di hutan-hutan tropis dan mengamankan tujuan mereka “...untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka” untuk menentukan nasib sendiri, memiliki dan mengontrol wilayah tradisional mereka, dan untuk dapat “hidup dan bekerja dalam lingkungan alam mereka menurut konsep-konsep pembangunan mereka sendiri.”<sup>61</sup>

Sebelumnya masyarakat adat telah sampai pada kesimpulan yang berbeda tentang apakah hutan-hutan itu sebaiknya dimasukkan dalam CDM atau tidak. Beberapa mempertanyakan etika memperdagangkan persediaan karbon di pasar internasional. Banyak yang menolak prinsip bahwa industri dan perusahaan-perusahaan pencemar dapat membeli ijin untuk terus melakukan pencemaran melalui perdagangan kredit karbon hutan. Mereka juga menolak anggapan bahwa nilai hutan dapat diturunkan ke nilai uang atas persediaan karbon mereka, dan menekankan bahwa bagi masyarakat adat nilai-nilai budaya dan spiritual atas hutan mereka adalah hal yang terpenting dan harus dihargai. Bagi mereka perdagangan kredit karbon itu tidak etis dan tidak rasional karena tidak mengatasi penyebab utama perubahan iklim (emisi dari bahan bakar fosil yang terus berlangsung dan meningkat). Mereka mencemaskan perdagangan dalam kredit karbon hutan dapat memupuk niat buruk pemerintah dan bisnis besar untuk merampas hutan masyarakat adat dan memindahkan komunitas mereka untuk mendapatkan dana karbon. Dalam berbagai pernyataan kepada UNFCCC, masyarakat adat telah meminta partisipasi yang efektif dalam negosiasi perubahan iklim untuk menjamin bahwa hak-hak dan prioritas mereka dibicarakan. Masyarakat adat secara konsisten juga meminta akses ke Dana Adaptasi UNFCCC untuk membantu mereka mengatasi dampak perubahan iklim saat ini dan dimasa mendatang di wilayah-wilayah mereka.<sup>62</sup>

Dalam kasus-kasus lain, seperti yang terlihat jelas di Brazil, beberapa masyarakat adat, dengan dukungan dari LSM Environmental Defense yang berkedudukan di Washington, telah menyerukan dimasukkannya hutan dalam Protokol Kyoto.<sup>63</sup> Mereka menyerukan bahwa proyek-proyek komunitas adat dan inisiatif-inisiatif pengelolaan sumber daya alam seharusnya terbuka terhadap pembayaran dan kredit dibawah kerangka kerja Kyoto atau lainnya.

## Lampiran 2 Kajian Stern atas Pencegahan Deforestasi

Laporan Stern mengusulkan bahwa satu tindakan penting yang seharusnya diambil oleh komunitas internasional untuk memperlambat perubahan iklim adalah mengatasi “emisi non-energi” dengan cara memberi *imbalan* atau kompensasi negara-negara berkembang untuk mengurangi deforestasi. Kajian ini memprediksi bahwa emisi dari deforestasi dapat mencapai 40 gigaton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) antara 2008-2012 yang meningkatkan konsentrasi CO<sub>2</sub> di atmosfer hingga 2 bagian per juta (*part per million/ppm*). Laporan ini menyatakan:

*“Emisi non-energi menyumbang sepertiga dari total emisi gas rumah kaca; aksi disini akan memberi kontribusi penting. Serangkaian bukti yang substansial menjelaskan bahwa tindakan untuk mencegah deforestasi yang lebih parah akan relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis mitigasi lain, jika ada kebijakan dan struktur kelembagaan yang benar.” (ringkasan eksekutif, halaman xiii)*

*“...keuntungan yang hilang (opportunity cost) dari perlindungan hutan di 8 negara yang bertanggung jawab atas 70 persen emisi dari penggunaan lahan dapat berkisar antara 5 miliar dolar per tahun pada awalnya, meskipun biaya marginal-nya akan meningkat sepanjang waktu.” (xxvi)*

### Permohonan untuk mendukung segera skema percontohan diluar UNFCCC

Laporan ini mencatat bahwa aturan-aturan yang ada di bawah Protokol Kyoto saat ini tidak mengijinkan pencegahan deforestasi dibawah CDM, meskipun ini dapat berubah dari periode komitmen kedua paska 2012. Sementara itu, ada argumentasi bahwa “...dukungan internasional bagi aksi yang dilakukan oleh negara-negara untuk mencegah deforestasi seharusnya dimulai sesegera mungkin...” melalui skema percontohan, yang “...dapat didasarkan pada dana-dana kontribusi sukarela dari negara-negara maju, bisnis dan LSM” (halaman 550)

*Aksi-aksi untuk melindungi area-area hutan alam yang masih tersisa diperlukan segera. Skema percontohan berskala besar diperlukan untuk menggali pendekatan-pendekatan yang efektif untuk memadukan aksi nasional dan dukungan internasional.” (xxv)*

### Pendekatan non-pasar atau pasar?

Stern mengusulkan bahwa pembentukan “dana yang dikhususkan” memiliki keuntungan atas pembayaran berbasis pasar karena dana non-pasar dapat ditujukan dimana dana-dana itu dapat memberikan keuntungan paling besar di tingkat negara, dan dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi penyebab utama “pendorong deforestasi” (halaman 550-551). Kajian ini mengusulkan bahwa dana semacam itu dapat membiayai skema percontohan pencegahan deforestasi dalam jangka pendek dan bahkan mungkin menjadi alternatif untuk solusi berbasis pasar. Meskipun demikian, solusi berbasis pasar tidak dinafikan oleh Stern: “dalam jangka panjang, ada alasan-alasan yang bagus untuk mengintegrasikan aksi pengurangan deforestasi dalam pasar karbon”. Satu pilihan yang diusulkan adalah pasar-pasar untuk “kredit keanekaragaman hayati atau kredit deforestasi. Kredit-kredit ini akan dilaksanakan dengan cara yang sama dengan kredit karbon, dengan permintaan yang datang dari mereka yang ingin berinvestasi dalam proyek-proyek kehutanan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau tujuan-tujuan lain.” (551)

### Usulan untuk skema pencegahan deforestasi di tingkat nasional

Seperti usulan-usulan lain pencegahan deforestasi yang ada, Stern lebih suka skema *country-wide* (untuk seluruh negara) – meskipun usulan-usulan ini bisa meliputi aksi-aksi di tingkat proyek. Stern mengajukan pendekatan nasional yang menyeluruh salah satunya untuk memberantas “kebocoran” dalam batas-batas negara (deforestasi yang dipindahkan). Masalah-masalah kebocoran transnasional dicatat, tapi tidak dibicarakan secara detil. (549)

**Apakah Stern membicarakan pertimbangan sosial dan keadilan?**

Kajian ini menyadari kebutuhan untuk membahas isu-isu kepemilikan “Di tingkat nasional, menetapkan hak-hak kepemilikan atas tanah hutan, dan menentukan ***hak-hak dan tanggung jawab*** pemilik tanah, masyarakat dan penebang, adalah kunci untuk pengelolaan hutan yang efektif. Ini seharusnya melibatkan komunitas lokal, menghargai hak-hak informal dan struktur sosial...” (halaman xxvi). Di sini juga ditekankan bahwa “Kejelasan atas batas-batas dan kepemilikan, dan alokasi hak-hak kepemilikan, akan meningkatkan efektivitas hak-hak kepemilikan dalam praktik dan menguatkan lembaga-lembaga yang diminta untuk mendukung dan menerapkannya” (halaman 541). Stern juga mencatat resiko-resiko yang dihasilkan melalui data dasar yang tidak benar, korupsi, perilaku ‘kejar setoran’ dan pengambilan manfaat oleh elit nasional (halaman 549-550), tapi mengusulkan beberapa ukuran kongkrit untuk mencegah atau meminimalkan resiko-resiko ini.

### Lampiran 3 Usulan Bank Dunia yang kontroversial bagi Aliansi Hutan Global<sup>64</sup> (GFA)

Pada tahun 2006 dan awal tahun 2007, Bank Dunia mengembangkan usulan dana baru yang sangat besar untuk membiayai proyek-proyek dan program-program sektor kehutanan di negara-negara berkembang dan menengah. Bank Dunia menyatakan bahwa satu tujuan penting GFA adalah untuk menghasilkan aliansi global yang “lebih efektif” untuk **mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari hutan**, dan “mengamankan ketersediaan layanan-layanan lingkungan”. Bank dunia berencana menggunakan mega dana ini untuk mengimplementasikan Strategi Kehutanan 2002-nya dengan penekanan kuat pada pendanaan iklim. **Hasil utama yang diharapkan dari GFA adalah meningkatnya intervensi dan pendanaan Bank Dunia di sektor kehutanan di negara-negara berkembang.**

#### *Jadwal GFA saat ini*

- Konsultasi dengan mitra dan calon mitra (Februari-Mei 07)
- Proses konsultasi yang lebih luas (Maret 2007-Oktober 2007)
- Peluncuran formal: Juni 2007
- Mulai operasi pada awal 2008

#### *Siapa yang akan menjadi mitra dalam usulan Aliansi Hutan Global ini?*

Dunia, GFA akan membantu perkembangan “koalisi yang lebih kuat dan lebih luas” antara Bank Dunia dan industri berbasis hutan, badan-badan yang berhubungan dengan hutan, komunitas riset internasional, LSM-LSM konservasi besar, LSM-LSM di negara berkembang, donor bilateral dan multilateral, para dermawan kaya, dan “kepentingan bisnis” yang akan bekerja bersama untuk “meniadakan hambatan bagi investasi dalam konservasi dan pemanfaatan hutan yang lestari”.

#### *Latar belakang dan dasar pemikiran:*

Konsep GFA pada prinsipnya telah dikembangkan dalam konsultasi dengan organisasi-organisasi konservasi utama Amerika Serikat di Washington DC, termasuk WWF, TNC, dan Conservation International, *tanpa* keterlibatan sebanding dengan LSM-LSM di Selatan, masyarakat adat, atau bahkan tidak terdapat banyak bukti keterlibatan pemerintah-pemerintah di Selatan. Bank Dunia dan LSM-LSM besar akan menciptakan GFA dengan tujuan khusus menangkap potensi dana untuk iklim ini, termasuk melalui *Forest Carbon Partnership Facility* (pencegahan deforestasi) (lihat di bawah), Dana Biokarbon (penanaman hutan kembali) dan sistem pembayaran atas jasa lingkungan (PES) berbasis pasar.

#### *GFA dan target pencegahan deforestasi*

GFA berharap mendukung instrumen-instrumen baru yang memberi imbalan kepada negara-negara yang “menjaga keberadaannya” dan akan mempromosikan “kemitraan internasional” berdasarkan kredit keuangan untuk “pencegahan deforestasi”.

#### *Beberapa target utama GFA yang diusulkan Bank Dunia untuk tahun 2015*

- Konservasi 1 miliar ton CO<sub>2</sub> melalui pengurangan laju deforestasi global melalui perbaikan data dasar dan pendekatan monitoring untuk mendukung pendanaan dari Dana Bio-karbon Bank Dunia dan “**mekanisme Pencegahan Deforestasi yang muncul**”, serta penguatan pasar untuk jasa-jasa lingkungan global
- 50 juta hektar kawasan lindung baru dan 120 juta hektar kawasan lindung dengan pengelolaan yang lebih baik, termasuk peningkatan kapasitas “Departemen Kehutanan pusat” untuk melindungi dan mengelola area-area yang dilindungi.

### **Keperihatinan serius berkaitan dengan usulan GFA Bank Dunia**

Ada banyak keperihatinan yang tumbuh diantara organisasi-organisasi masyarakat sipil dan beberapa organisasi pemerintah bahwa ada resiko konflik kepentingan yang serius dalam konsep GFA dalam mana LSM-LSM konservasi yang akan mendapat manfaat dari dana Bank Dunia diajak konsultasi untuk mendisain struktur dan fungsi badan yang akan membuat prioritas dan melakukan pembayaran dana tersebut. Beberapa kritik juga menunjukkan bahwa proposal GFA berfokus pada “target” kuantitatif mentah dan bukan pada *kualitas* penyusunan kebijakan kehutanan dan pengelolaan hutan. Kritik atas rencana Bank Dunia itu juga menunjuk pada potensi kontradiksi antar berbagai sarasannya: lebih banyak kawasan lindung, lebih banyak hutan disertifikasi, lebih banyak investasi sektor swasta, lebih banyak hutan “masyarakat”, dan lebih banyak karbon yang “dilindungi”.

Meskipun banyak rujukan tentang “pengelolaan hutan masyarakat”, secara keseluruhan proposal GFA tahun 2007 didasarkan pada model-model “pengembangan” hutan dari Bank Dunia yang berorientasi kayu (timber-centric) yang buruk dan ketinggalan jaman serta dukungan bagi penebangan yang bersertifikat, hutan tanaman skala besar dan berlanjutnya pembiayaan IFC untuk sektor kertas dan bubur kayu.

### **Proposal Bank Dunia-G8 untuk “Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan” (Forest Carbon Partnership Facility – FCPF)<sup>65</sup>**

FCPF sedang dipromosikan oleh Bank Dunia dengan dukungan pemerintah Jerman untuk “menyiapkan panggung” untukantisipasi dimasukkannya skema REDD dibawah UNFCCC untuk komitmen reduksi emisi berikutnya sejak tahun 2012. Oleh karena itu usulan FCPF ini akan diatur di luar UNFCCC, tapi akan “mempertimbangkan” negosiasi-negosiasi UNFCCC sekarang dan yang akan datang. Pada bulan Mei 2007, Bank Dunia menyiapkan “Nota Informasi” mengenai proposal FCPF untuk dipertimbangkan pada pertemuan puncak G8 di *Heiligendamm* pada bulan Juni 2007 dimana ini akan mendesak anggota G8 untuk mendukung FCPF “...sebagai sebuah kerangka kerja untuk memulai kegiatan-kegiatan di negara-negara berkembang yang akan mengurangi emisi CO<sub>2</sub> dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).”

Diusulkan bahwa FCPF akan melaksanakan kegiatan-kegiatan percontohan yang akan:

- Menguji kelayakan pendekatan-pendekatan metodologis yang berbeda untuk skema pembayaran REDD, seperti metode-metode untuk mengukur dan memperkirakan “angka referensi nasional, monitoring dan verifikasi” yang akan diterapkan dalam “sistem besar” global di masa mendatang
- Menyiapkan 20 atau 30 pemerintah negara berkembang untuk sistem insentif REDD global di masa mendatang melalui peningkatan kapasitas untuk (i) kompilasi sebuah data dasar “skenario acuan” dan “perkiraan yang kredibel mengenai persediaan karbon nasional mereka dan sumber-sumber emisi dari hutan”; dan (ii) mengembangkan strategi REDD nasional yang akan “mempertimbangkan prioritas dan hambatan mereka”. Bank Dunia mengusulkan bahwa kegiatan-kegiatan ini akan dibiayai oleh mekanisme pendanaan utama Bank Dunia yang lain - GFA
- Skema percontohan REDD nasional paling tidak di 5 negara berkembang.
- Membiayai “kegiatan-kegiatan spesifik [perlindungan hutan]” di negara-negara contoh yang akan direncanakan dan diimplementasikan oleh “institusi-institusi nasional dan pemerintah, dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan masyarakat sipil yang utama”. Ini bisa meliputi “perbaikan penegakan aturan pelarangan deforestasi”, dukungan untuk sistem-sistem kawasan lindung, dukungan anggaran pemerintah pusat; dukungan untuk layanan pencegahan dan pemadaman kebakaran; (iv) dukungan untuk inisiatif-inisiatif sertifikasi nasional; atau (v) pembayaran yang ditujukan bagi jasa-jasa lingkungan...” secara langsung kepada penerima manfaat
- Menyalurkan uang ke “pelaku swasta” melalui badan-badan pemerintah
- Menggunakan pendekatan pasar dan non-pasar, termasuk dana-dana dari badan-badan pembangunan bilateral, Lembaga Keuangan Internasional (IFI) publik, Korporasi Pembiayaan Internasional (IFC), Global Environment Facility (GEF) dan yayasan-yayasan.

***Potensi dampak negatif sosial dan sumber-sumber penghidupan akan dikesampingkan lagi?***

Dalam sebuah lokakarya yang diadakan di Berlin pada bulan April 2007 untuk mendiskusikan garis besar proposal FCPF, beberapa pemerintah mengajukan pertanyaan mengenai kapasitas FCPF untuk memberikan manfaat lokal dan menyoroti keprihatinan-keprihatinan tentang resiko skema REDD yang mendukung kebijakan kehutanan yang tidak adil yang ada sekarang ini. Namun demikian, catatan konsep Bank Dunia pada bulan Maret 2007 hanya mengakui secara singkat bahwa: “keadilan dalam skema pembayaran, termasuk partisipasi masyarakat, akan menjadi faktor penting bagi kesinambungan program”. Bank Dunia dan pendukung lain FCPF tidak menanggapi resiko sosial dan dorongan bagi penegakan kebijakan perlindungan hutan yang tidak adil. Bank Dunia secara sederhana mengusulkan “berbagi pelajaran” dari kegiatan-kegiatan percontohan, tanpa aksi-aksi atau inisiatif-inisiatif nyata untuk menjawab permasalahan sosial, hak, dan akuntabilitas.

## Catatan Akhir

- <sup>1</sup> Bangladesh, Bolivia, Central African Republic, Cameroon, Chile, Congo, Colombia, Costa Rica, DR Congo, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Fiji, Gabon, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kenya, Lesotho, Malaysia, Nicaragua, Nigeria, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Samoa, Solomon Islands, Thailand, Uruguay, Uganda, and Vanuatu (see <http://www.rainforestcoalition.org/eng/>)
- <sup>2</sup> Moutinho, P, Santilli, M, Schwartzman, S and Rodrigues, L (2005) *Why ignore tropical deforestation? A proposal for including forest conservation in the Kyoto Protocol* [http://ftp.whrc.org/policy/COP/Brazil/moutinho%20et%20al%20%202006%20%20Unasyvla%20222\\_27-30.pdf](http://ftp.whrc.org/policy/COP/Brazil/moutinho%20et%20al%20%202006%20%20Unasyvla%20222_27-30.pdf) See also Moutinho, P and Schwartzman, S (Eds) (2005) *Tropical Deforestation and Climate Change* Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia and Environmental Defense, Belém and Washington DC [http://www.environmentaldefense.org/documents/4930\\_TropicalDeforestation\\_and\\_ClimateChange.pdf](http://www.environmentaldefense.org/documents/4930_TropicalDeforestation_and_ClimateChange.pdf)
- <sup>3</sup> UNFCCC (2007) *Report on the second workshop on reducing emissions from deforestation in developing countries* FCCC/SBSTA/2007/3 <http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbsta/eng/03.pdf>
- <sup>4</sup> Government of Brazil (2006) Positive incentives for voluntary action in developing countries to address climate change: Brazilian perspective on Reducing Emissions from Deforestation Paper presented to UNFCCC COP 12, Nairobi, Kenya, November 2006. [http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/wp\\_21\\_braz.pdf](http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/wp_21_braz.pdf) For local government REDD proposals in Brazil, see – Viana, V M, Cenamo, M C and Manfrinato, W (2006) Reducing Emissions from Deforestation in Amazonas, Brazil: a State government’s proposal for action [http://www.sds.am.gov.br/programas\\_02.php?cod=2485](http://www.sds.am.gov.br/programas_02.php?cod=2485)
- <sup>5</sup> Stern N (2007) *The Economics of Climate Change: The Stern Review* HM Treasury/Cabinet Office: CUP, Cambridge at page 547
- <sup>6</sup> Bank Dunia saat ini mengelola tidak kurang dari 10 dana karbon global yang bernilai 2 miliar dolar Amerika atas nama 16 pemerintah dan 64 perusahaan swasta. Dana-dana ini meliputi The Prototype Carbon Fund (PCF), “Biocarbon Fund” (BioCF), Community Development Carbon Fund, the Netherlands Clean Development Facility, the Italian Carbon Fund, the Spanish Carbon Fund and the Danish Carbon Fund, among others.
- <sup>7</sup> The European Space Agency mengklaim bahwa mereka telah mengembangkan kerangka kerja untuk Monitoring Global untuk Keamanan dan Lingkungan (GMES) yang meliputi Proyek Monitoring Hutan melalui penginderaan jarak jauh menggunakan Satelit Sentinel GMES, yang akan menyediakan “tutupan global setiap 5 hari dengan resolusi 10 meter” lihat press release European Space Agency (2006) “ESA backs incentives for developing countries avoiding deforestation” [http://www.esa.int/esaLP/SEMOKCC4VUE\\_LPgmes\\_0.html](http://www.esa.int/esaLP/SEMOKCC4VUE_LPgmes_0.html)
- <sup>8</sup> Fearnside, P (2003) “Avoided Deforestation in Amazonia as a Global Warming Mitigation Measure: the case of Mato Grosso” *World Resource Review* 15(3)(2003):352-361
- <sup>9</sup> See, for example, Smith, K, Mulungoy, R and Sayer, J (2005) “Harnessing carbon markets for tropical forest conservation: towards a more realistic assessment” in Sayer, J (Ed)(2005) *Earthscan Reader in Forestry and Development* Earthscan, London and Sterling at page 329. See also, Chomitz, K M (2006) *Policies for national-level avoided deforestation programs: a proposal for discussion* Background paper for policy research report on tropical deforestation, Revised Draft 1.3 <http://www.rainforestcoalition.org/documents/ChomitzAvoidedDeforestationrev1.3.pdf>
- <sup>10</sup> CAN International (2007a) *Reducing emissions from deforestation in development countries: approaches to stimulate action* Climate Action Network International Submission to international workshop on “Reducing Emissions from Deforestation”, February 2007 [halaman](#) 7.
- <sup>11</sup> <http://www.kyoto2.org/>
- <sup>12</sup> Tickell, O pers. comm., May 2007
- <sup>13</sup> Environmental Defense (2006) Compensated reduction – a positive incentive for tackling the largest source of greenhouse gas emissions in the developing world [http://www.environmentaldefense.org/documents/4875\\_CompensatedReduction\\_Overview.pdf](http://www.environmentaldefense.org/documents/4875_CompensatedReduction_Overview.pdf)
- <sup>14</sup> Environmental Defense (2006) Compensated reduction – a positive incentive for tackling the largest source of greenhouse gas emissions in the developing world [http://www.environmentaldefense.org/documents/4875\\_CompensatedReduction\\_Overview.pdf](http://www.environmentaldefense.org/documents/4875_CompensatedReduction_Overview.pdf)
- <sup>15</sup> Speech by Secretary of State, Hilary Benn, on *The Future of the World Bank*, Royal Africa Society/School of Oriental and African Studies, London <http://www.dfid.gov.uk/news/files/Speeches/world-bank-april07.asp>
- <sup>16</sup> Lihat, sebagai contoh, Ebeling J and Tippmann R (2007) *International policy for avoided deforestation – reaching synergies for environment and development* Presentation by EcoSecurities to Yale workshop on Financing for Forest Conservation, 2-3 March 2007

- <sup>17</sup> CAN International (2007a) *op. cit.* CANI (2007b) *Report of Workshop on Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries, 7-9 March 2007 – Cairns, Australia* laporan Internal yang tidak dipublikasikan
- <sup>18</sup> Government of India (2007) *Indian Proposal: An Alternative Policy Approach to Avoided Deforestation: compensated conservation* Presentation to 2<sup>nd</sup> UNFCCC workshop on Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries, 7-9 March 2007, Cairn, Australia  
[http://unfccc.int/files/methods\\_and\\_science/lulucf/application/pdf/070307kishwan.pdf](http://unfccc.int/files/methods_and_science/lulucf/application/pdf/070307kishwan.pdf)
- <sup>19</sup> Government of Indonesia (2007) *Reducing emissions from deforestation in developing countries (REDD)* Paper submitted to UNFCCC SBSTA by the Government of Indonesia
- <sup>20</sup> Prior, S, Streck, C and O’Sullivan, R (2006) “Incentivising avoided deforestation – a stock based methodology” Submission by the Centre for International Sustainable Development Law to the COP UNFCCC in response to calls for views on the issue of avoided deforestation issues at its 11<sup>th</sup> Session, March 2006. Chomitz, KM, Buys, P, De Luca, G, Thomas TS and Wertyz-Kanounnikoff, S (2007) *At loggerheads? Agricultural expansion, poverty reduction, and environment in the tropical forests* World Bank, Washington D.C. [halaman](#) 204
- <sup>21</sup> Lihat, sebagai contoh, Butler, R (2006) “Avoided deforestation could help fight third world poverty under global warming pact: \$43 billion could flow into developing countries” *Mongabay.com* bulletin October 31, 2006
- <sup>22</sup> Chomitz, KM, et al (2007) *op. cit.*. [halaman](#) 195
- <sup>23</sup> Government of Indonesia (2007) *Reducing emissions from deforestation in developing countries (REDD)* Paper submitted to UNFCCC SBSTA by the Government of Indonesia  
<http://www.cifor.cgiar.org/NR/rdonlyres/4E81DB28-410F-4885-ACB6-6CA802603A32/0/indonesia.pdf>
- <sup>24</sup> Lihat, sebagai contoh, Robertson, N and Wunder S (2005) *Fresh tracks in the forest: assessing incipient payments for environmental services initiatives in Bolivia* CIFOR, Bogor
- <sup>25</sup> ICRAF (2006) “Clean Rivers, Lighted Lights: monetary rewards for reducing sediment” *RUPES Sumberjaya Brief No.2*, World Agroforestry Centre, Bogor; ICRAF (2007) “In Bakun, indigenous peoples use modern mechanisms for selling environmental services to preserve a traditional way of life without its poverty traps” *Site Profile: RUPES Bakun* ICRAF, Baguio City
- <sup>26</sup> Wunder, S (2006) “Are direct payments for environmental services spelling doom for sustainable forest management in the tropics?” *Ecology and Society* 11 (2):23
- <sup>27</sup> May, P, Boyd, E, Chang, M and Veiga Neto, F C (2005) “Incorporating sustainable development in carbon forest projects in Brazil and Bolivia” *Estudos Sociedade e Agricultura* 1 (2005)
- <sup>28</sup> Granda, P (2005) *Carbon Sink Plantations in the Ecuadorian Andes: impacts of the Dutch FACE-PROFAFOR monoculture tree plantations’ project on indigenous and peasant communities* WRM Series on Tree Plantations No. 1, WRM, Montevideo
- <sup>29</sup> Karsenty, A (2004) “Des rentes contre le développement? Les nouveaux instruments d’acquisition mondiale de la biodiversité et l’utilisation des terres dans les pays tropicaux” *Mondes en développement* 127(3):1-9. See also, Friends of the Earth International (2005) *Nature for Sale: privatization - the impacts of privatizing water and biodiversity* FOEI, Amsterdam <http://www.foei.org/en/publications/pdfs/privatization.pdf> See also *Global Forest Coalition (2007) Potential Policy Approaches and Positive Incentives to Reduce Emissions from Deforestation in Developing Countries* A submission to the Secretariat of the Framework Convention on Climate Change [http://www.wrm.org.uy/GFC/material/Incentives\\_Reduce\\_Emissions.html](http://www.wrm.org.uy/GFC/material/Incentives_Reduce_Emissions.html)
- <sup>30</sup> Lihat, sebagai contoh, Makelo, S (2006) *The DRC Case Study: the impacts of carbon sinks of Ibi-Batéké Project on the indigenous Pygmies of the Democratic Republic of Congo* <http://www.international-alliance.org/documents/Climate%20Change%20-%20DRC.pdf>
- <sup>31</sup> Nature Conservancy (2007) *Climate Action Project: Noel Kempff Mercado National Park, Bolivia* <http://www.nature.org/initiatives/climatechange/work/art4253.html>
- <sup>32</sup> May, PH, Boyd, E, Veiga F and Chang M (2004) *Local sustainable development effects of forest carbon projects in Brazil and Bolivia* Environmental Economics Programme, IIED, London; Robertson, N and Wunder S (2005) *op. cit.*
- <sup>33</sup> <http://dup.esrin.esa.it/news/news125.asp>
- <sup>34</sup> Wynn, G (2007) “World Bank eyes \$250 mln deal to save forests” *Reuters, Thu May 3, 2007*
- <sup>35</sup> Governors of Aceh, Papua and Papua Barat (2007) *Declaration of the Governors of Aceh, Papua and Papua Barat on Climate Change* April 26, 2007, Nusa Dua, Bali
- <sup>36</sup> ENS (2007) “Ecuador Seeks Compensation to Leave Amazon Oil Undisturbed QUITO, Ecuador, April 24, 2007” <http://www.ens-newsire.com/ens/apr2007/2007-04-24-04.asp>

- <sup>37</sup> Lihat, sebagai contoh, Griffiths, T, Rebbapragada, R and Kalluri, B (2005) “The Great ‘Community Forest Management’ Swindle In India – critical evaluation of an ongoing World Bank-financed project in Andhra Pradesh” *in Broken Promises: how World Bank policies fail to protect forests and forest people’ rights* World Rainforest Movement, FPP, RF-UK, EDF, Global Witness – see [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org).
- <sup>38</sup> Colchester, M and Lohmann, L (1990) *The Tropical Forestry Action Plan: What Progress?* WRM and The Ecologist, Penang and Sturminster Newton. See also Hildyard N, Hegde P, Wolverkamp P and Reddy S (1998) *Same Platform, Different train: the politics of participation* <http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=51958>
- <sup>39</sup> *Global Forest Coalition* (2007) *From Meals to Wheels: the social and ecological catastrophe of agrofuels* GFC and Global Justice Ecology Project. See especially, Tauli-Corpuz, V and Tamang P (2007) *Oil Palm and other Commercial Tree Plantations: impacts on indigenous peoples’ land tenure and resource management systems and livelihoods* UN Permanent Forum on Indigenous Issues, 6<sup>th</sup> Session, New York, 14-25 May 2007 [http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/6session\\_crp6.doc](http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/6session_crp6.doc)
- <sup>40</sup> Counsel, S (2005) “Democratic Republic of Congo – after the war the fight for the forest” pp.11-19 *in Broken Promises: how World Bank Group policies fail to protect forests and forest peoples’ rights* FPP, WRM, ED, DTE, Global Witness, RF-UK, Sinkswatch. Moreton-in-Marsh and Monetevideo. See also Inspection Panel (2006) *Report and Recommendation on Request for Inspection, Democratic Republic of Congo: Transitional Support for Economic Recovery Credit Operation (TSERO) (IDA Grant No. H192-DRC) and Emergency Economic and Social Reunification Support Project (EESRSP) (IDA Credit No. 3824-DRC and IDA Grant No. HO64-DRC)* Inspection Panel, Washington, DC
- <sup>41</sup> Colchester, M (2003) *Salvaging Nature: indigenous peoples, protected areas and biodiversity conservation* WRM and FPP, Montevideo and Moreton-in-Marsh
- <sup>42</sup> Colchester, M, Boscolo, M, Contreras-Hermosilla, A, Del Gatto, F, Dempsey, J, Lescuyer G, Obidzinski, K, Pommier, D, Richards, M, Sembiring S N, Tacconi, L, Vargas Rios M T and Wells, A (2006) *Justice in the Forest: rural livelihoods and forest law enforcement* CIFOR, Bogor
- <sup>43</sup> Lihat, sebagai contoh, Griffiths, T (2005) *Indigenous Peoples and the Global Environment Facility (GEF) Indigenous Peoples’ experiences of GEF-funded Biodiversity Conservation - A critical study* FPP, Moreton-in-Marsh
- <sup>44</sup> Granda, P (2005) *Carbon Sink Plantations in the Ecuadorian Andes: impacts of the Dutch FACE-PROFAFOR monoculture tree plantations’ project on indigenous and peasant communities* WRM Series on Tree Plantations No. 1, WRM, Montevideo
- <sup>45</sup> Lihat khususnya, International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests (2005) *Our knowledge Our Survival: Traditional Forest Related Knowledge and the Implementation of Related International Commitments* IAITPF and CIFOR, Chiang Mai and Bogor. See also: Colchester, M (Ed)(2001) *A survey of indigenous land tenure* FPP, Moreton-in-Marsh.
- <sup>46</sup> “Focus on High Conservation Value Forests” *WRM Bulletin No. 114 January 2007* <http://www.wrm.org.uy/bulletin/114/viewpoint.html#Policy>
- <sup>47</sup> May, PH, Boyd, E, Veiga F and Chang M (2004) *Local sustainable development effects of forest carbon projects in Brazil and Bolivia* Environmental Economics Programme, IIED, London [halaman](#) 85.
- <sup>48</sup> Untuk eksaminasi yang detail dan menyeluruh mengenai problem ilmiah dan etis dari perdagangan dan pasar karbon, lihat Lohmann, L (2006) “Carbon Trading: a critical conversation on climate change, privatisation and power” *Development Dialogue No.48 (September 2006)*
- <sup>49</sup> Lihat, sebagai contoh, the CAN update on avoided deforestation published at the 26<sup>th</sup> meeting of the UNFCCC SBSTA – CAN (2007) “Code REDD” *Eco, 11 May, 2007*. Lihat juga laporan workshop dua hari yang diselenggarakan di Chatam House, Inggris dan dilaporkan oleh the Royal Society of Birds (RSPB) yang tampak tidak membahas isu-isu hak, keadilan dan kemiskinan sebagai isu utama dalam pembicaraan di pertemuan tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa topik itu hampir tidak pernah disinggung dalam diskusi terbuka yang terutama berfokus pada isu keuangan dan teknis.– RSPB (2007) *Workshop on Reducing Emissions from Tropical Deforestation* RSPB and Chatham House, 16-17 April, 2007
- <sup>50</sup> Cf. Wunder, S (2005) *Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts*, CIFOR, Bogor at page 22.
- <sup>51</sup> *WWF - the Gold Standard – background and overview* <http://assets.panda.org/downloads/thegoldstandardoverview.doc>
- <sup>52</sup> <http://www.climate-standards.org/>
- <sup>53</sup> Sampai saat ini CCB baru mensertifikasi 2 proyek kehutanan karbon PES di Cina dan Panama - lihat [http://www.climate-standards.org/news/news\\_feb2007.html](http://www.climate-standards.org/news/news_feb2007.html)

- <sup>54</sup> Lihat Colchester, M, Sirait M and Wijardjo B (2003) *The Application of FSC Principles 2 & 3 in Indonesia: Obstacles and Possibilities* WALHI and AMAN, Jakarta. Colchester, M (2006) “Guyana: Controversial Barama certificate further tarnishes FSC’s reputation” *WRM Bulletin No. 105, April, 2006*. Lihat juga WRM (2003) *Certifying the Uncertifiable. FSC Certification of Tree Plantations in Thailand and Brazil* <http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/uncertifiable.html>
- <sup>55</sup> Smith, J and Scherr, SJ (2002) *Forest Carbon and Local Livelihoods: assessment of opportunities and policy recommendations* CIFOR Occasional Paper No. 37, CIFOR, Bogot; Peskett, Brown, D and Luttrell, C (2006) *Can payments for avoided deforestation to tackle climate change also benefit the poor?* Forest Policy and Environment Programme – FPEP, ODI, London
- <sup>56</sup> The Mumbai - Porto Alegre Forest Initiative <http://www.wrm.org.uy/statements/Mumbai/index.html>
- <sup>57</sup> Indigenous Peoples’ Statement (2007) *Indigenous Peoples Major Group – Opening Statement UN Commission on Sustainable Development, Inter-active Session with Major Groups – Monday, April 30, 2007*
- <sup>58</sup> Lihat, sebagai contoh, WRM (2000) “The Mount Tamalpais Declaration” WRM’s bulletin N<sup>o</sup> 39, October 2000. WRM (2000) *Climate Change Convention: Sinks that stink* WRM, Montevideo <http://www.wrm.org.uy/actors/CCC/Sinks%20that%20Stink.rtf>
- Lihat juga, FERN (2000) “Brussels boiling over on carbon sinks issue” *EU Forest Watch Issue 47 - Special Report: Climate Change* <http://www.fern.org/pubs/fw/srnov00.pdf>. IFIPCC (2001) *The Bonn Declaration Third International Forum of Indigenous Peoples and Local Communities on Climate Change* 14-15 June, 2001 [http://www.tebtebba.org/tebtebba\\_files/susdev/cc\\_energy/bonndeclaration.htm](http://www.tebtebba.org/tebtebba_files/susdev/cc_energy/bonndeclaration.htm)
- <sup>59</sup> Humphreys D (2006) *Logjam: deforestation and the crisis of global governance* Earthscan Forestry Library, Earthscan: London and Sterling at page 207
- <sup>60</sup> *Kimberley Declaration* <http://www.treatycouncil.org/The%20Kimberley%20Declaration%20International%20Indigenous%20Peoples%20Summit%20on%20Sustainable%20Development.pdf> [http://www.terradaily.com/reports/More\\_Than\\_50\\_Tribes\\_Convene\\_on\\_Global\\_Warming\\_Impacts\\_999.html](http://www.terradaily.com/reports/More_Than_50_Tribes_Convene_on_Global_Warming_Impacts_999.html) See also ENS (2007) “Indigenous Peoples on Climate Change Front Lines” <http://www.ens-newswire.com/ens/apr2007/2007-04-19-03.asp>
- <sup>61</sup> *Climate Alliance Manifesto* <http://www.klimabuendnis.org/english/association/511a.htm> See also, the *Climate Alliance Declaration* <http://www.klimabuendnis.org/buendnis/5120222.htm>
- <sup>62</sup> See IFIPCC (2000a) “The Quito Declaration on Climate Change Negotiations - Recommendations of indigenous peoples and organizations regarding the process of the framework convention on climate change” *Quito, Ecuador, May 4-6, 2000.*; IFIPCC (2000b) “Declaration of the First International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change” *Lyon, September 4-6, 2000*; IFIPCC (2000c) “Second International Indigenous Forum on Climate Change - Declaration of Indigenous Peoples on Climate Change” *The Hague, November 11-12, 2000*; IFIPCC (2001) “The Bonn Declaration Third International Forum of Indigenous Peoples and Local Communities on Climate Change” *Bonn, 14-15 June, 2001*; Indigenous Peoples and Local Communities Caucus (2001) *Declaration to Seventh Session of the Conference of the Parties United Nations Framework Convention on Climate Change* Marrakech, October 29 to November 9, 2001 – declarations available at [http://www.tebtebba.org/tebtebba\\_files/susdev/cc\\_energy/cc.html](http://www.tebtebba.org/tebtebba_files/susdev/cc_energy/cc.html) Indigenous Peoples’ Caucus (2002) *Statement on Climate Change to COP8, UNFCCC COP 8, UNFCCC, New Delhi, October 23 - November 1, 2002* Indigenous Peoples’ Caucus (2004) *Declaration of the Indigenous Peoples Attending COP 10, UNFCCC Buenos Aires, December 6 – 17, 2004*
- <sup>63</sup> Colchester, M (2001) “Capturing carbon: dilemmas for forest peoples” *WRM Bulletin No. 48, July 2001*
- <sup>64</sup> World Bank (2007) *Global Forest Alliance: proposal for a comprehensive approach to the conservation and sustainable use of the world’s forests* SDN Forest and Carbon Finance Teams, World Bank, Washington, DC February 15, 2007
- <sup>65</sup> *Forest Carbon Partnership Facility: Concept Note, March 2007; Non-Paper on the Forest Carbon Partnership Facility - Chair’s summary of the Berlin Workshop* Discussions Federal Ministry of Economic Cooperation and Development and Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, G8, April 2007



Sejumlah usulan muncul dari kebijakan-kebijakan global untuk mendukung '*Reduced Emissions from Deforestation*' (RED) untuk membantu memerangi perubahan iklim. Laporan FPP ini menganalisis usulan-usulan tersebut dan menekankan perlu adanya debat mengenai isu-isu sosial dan hak yang kemungkinan luput diperhitungkan.

**Forest Peoples Programme**  
1c Fosseway Centre, Stratford Road  
Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK  
Tel: +44 (0)1608 652893, fax: +44 (0)1608 652878

email: [info@forestpeoples.org](mailto:info@forestpeoples.org)  
<http://www.forestpeoples.org>